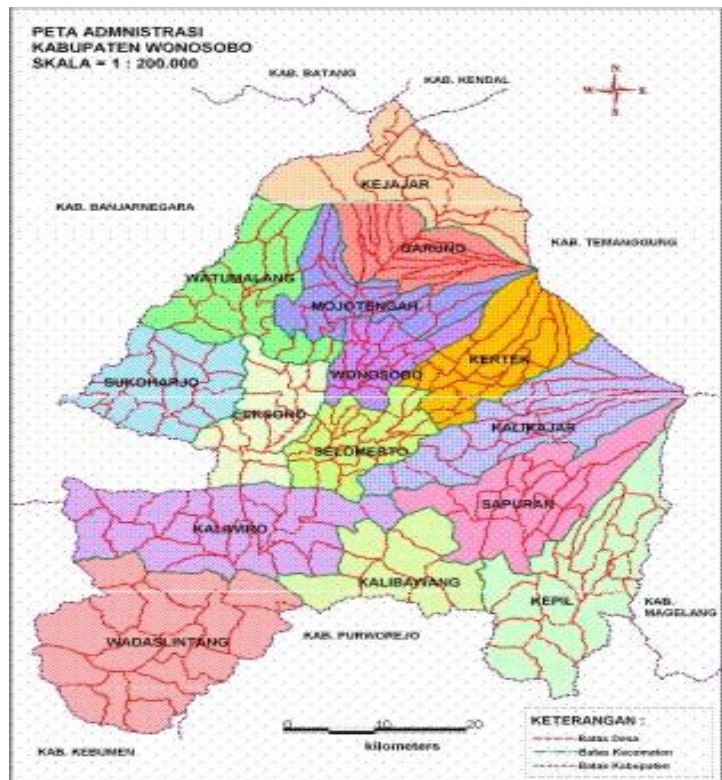


BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

Kondisi Geografis



Secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak antara 7. 11' dan 7. 36' Lintang Selatan (LS), 109. 43' dan 110. 04' Bujur Timur (BT). Jarak ibukota Kabupaten Wonosobo ke ibukota Provinsi Jawa Tengah berjarak 120 Km dari ibukota negara (Jakarta) berjarak 520 Km. Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 275 meter sampai 2.250 meter di atas permukaan laut.

Dalam lingkup wilayah provinsi, Kabupaten Wonosobo terletak di bagian tengah yang berbatasan dengan beberapa kabupaten. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang, sebelah selatan berbatasan

dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara.

Secara administratif Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 15 kecamatan. Jarak kecamatan ke ibukota kabupaten terjauh adalah 37 Km. Jarak terjauh antar ibukota kecamatan adalah 54 Km. Luas wilayah Kabupaten Wonosobo mencapai 98.468 hektare dengan kondisi biogeofisik sebagai berikut: kemiringan 3-8 seluas 54,4 ha, 8-15 seluas 24.769,1 ha, 15-40 seluas 42.173,6 ha dan lebih dari 40 derajat seluas 31.829.9 ha.

Apabila ditinjau dari penggunaan lahan, wilayah terluas sebagai tegalan/kebun yang mencapai 42.73 persen, lahan sawah 16.29 persen dan hutan negara 17.10 persen. Sebagaimana keadaan di Indonesia pada umumnya, Kabupaten Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim dalam setahun, kemarau dan penghujan. Rata-rata suhu udara 14.3-26.5⁰ derajat celcius, dengan curah hujan pertahun berkisar antara 1.713-4.255 mm/tahun. Secara kelembaban Wonosobo mempunyai kelembaban kelas lembab. Dengan curah hujan cukup tinggi dan tanah yang cukup subur menjadikan pertanian sebagai sektor yang cukup dominan di Kabupaten Wonosobo.

Sebagaimana keadaan di Indonesia pada umumnya. Kabupaten Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara rata-rata di kabupaten Wonosobo antara 14.3 – 26.5 derajat celcius dengan curah hujan rata-rata mencapai 1.713 – 4.255 mm/tahun. Secara umum kabupaten Wonosobo mempunyai kelembaban kelas lembab. Dengan curah hujan yang cukup tinggi dan kondisi tanah yang subur menjadikan pertanian sebagai sektor yang dominan bagi perekonomian masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo, dibentuk berdasarkan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (diundangkan pada Tanggal 8 Agustus 1950).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, Bab III, Pasal 3 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan:

Bupati berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah :

Bupati mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- 3) Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD;
- 4) Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- 6) Mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Sedangkan kedudukan Wakil Bupati sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan.

Wakil Bupati mempunyai tugas :

- 1) Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- 2) Membantu Bupati mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
- 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan /atau desa.
- 4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.

- 5) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- 6) Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

Pasal 5, menyatakan kewajiban Bupati dan Wakil Bupati meliputi :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 5) Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang – undangan;
- 6) Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 7) Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- 8) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- 10) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- 11) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD;
- 12) Selain kewajiban tersebut di atas, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Bupati dibantu oleh :

1. Staf ahli meliputi :
 - 1) Staf ahli bidang Hukum dan Politik.
 - 2) Staf ahli bidang Pemerintahan.
 - 3) Staf ahli bidang Pembangunan.

- 4) Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 - 5) Staf ahli Ekonomi dan Keuangan.
2. Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, terdiri dari :
- Sekretaris Daerah yang salah satu fungsinya mengkoordinasikan bagian – bagian di lingkungan Sekretariat Daerah. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut dibantu oleh;
- a. Asisten Pemerintahan, mengkoordinasikan :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan.
 - b) Bagian Hukum.
 - c) Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinasikan :
 - a) Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
 - b) Bagian administrasi pembangunan.
 - c) Bagian Kesejahteraan rakyat.
 - c. Asisten Administrasi, mengkoordinasikan :
 - a) Bagian Organisasi.
 - b) Bagian umum.
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat.
3. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian umum dan Keuangan.
 - c. Bagian Persidangan.
 - d. Bagian Hukum.
4. Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati terdiri dari :
- a. Inspektorat.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - d. Badan Keluarga Berencana.
 - e. Badan Kepegawaian Daerah.
 - f. Badan Lingkungan Hidup.
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - h. Kantor Ketahanan Pangan.
 - i. Kantor arsip.
 - j. Kantor Perpustakaan.
 - k. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu .

5. Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga.
 - b. Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Sosial.
 - d. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi.
 - e. Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika.
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 - h. Dinas Pekerjaan Umum.
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
 - k. Dinas Peternakan dan Perikanan.
 - l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 - m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - n. Dinas Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Kecamatan sebagai wilayah kerja camat merupakan bagian perangkat daerah kabupaten. Di Kabupaten Wonosobo, memiliki 15 (lima belas) wilayah kecamatan.
7. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kecamatan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Kondisi Sumber Daya Manusia Kabupaten Wonosobo

Pada tahun 2014 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 8.054 orang pegawai. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 maka terjadi penurunan jumlah pegawai sebanyak 386 orang pegawai. Secara rinci kondisi sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. SDM Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Menurut Tingkat Pendidikannya sebagai berikut:

TK. PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	Grand Total
SD	189	10	199
SLTP	268	10	278
SLTA	911	592	1503
D-I	12	39	51
D-II	383	410	793
D-III	231	441	672
D-IV	18	54	72
S1	2.014	2.315	4.329
S2	385	162	547
Grand Total	4.411	4.033	8.444

Sumber: BKD kab. Wonosobo

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah terbesar pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo mempunyai pendidikan S-1 dengan persentase mencapai 51.27 persen. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 terjadi peningkatan sekitar 5.6 persen dimana pada tahun 2012 jumlah pegawai yang berpendidikan S-1 baru mencapai 45.59 persen. Sedangkan pegawai dengan latar belakang pendidikan D-IV proporsinya paling sedikit hanya 0,08 persen.

2. SDM Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Menurut Jenis Jabatannya sebagai berikut:

JENIS JABATAN	PRIA	WANITA	Grand Total
STRUKTURAL	523	252	775
FUNGSIONAL KHUSUS	2.456	2.979	5.435
FUNGSIONAL UMUM/STAF	1.183	444	1.627
CPNS	249	358	607
Grand Total	4.411	4.033	8.444

Sumber: BKD Kab. Wonosobo

Dilihat menurut jenis jabatannya proporsi terbesar pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah jabatan fungsional khusus yang mencapai 64.36. Namun apabila dicermati lebih lanjut diketahui bahwa proporsi terbesar dari jabatan fungsional khusus adalah tenaga guru dari keseluruhan jabatan fungsional khusus yang ada di Kabupaten Wonosobo. Pada urutan kedua adalah jabatan fungsional khusus dibidang kesehatan, sementara di bidang lainnya masih sangat terbatas.

Sumber Daya Keuangan

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menganggarkan penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2014 secara keseluruhan diestimasikan sejumlah Rp. 1.259.212.601.746,- yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 126.737.232.802,-
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 812.486.954.944,-
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah sejumlah Rp. 319.988.414.000,-

Belanja Daerah

Belanja daerah tahun 2014 secara keseluruhan dianggarkan sejumlah Rp. 1.525.106.458.420,- yang terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintah daerah. Belanja tidak langsung tahun 2014 dianggarkan sejumlah Rp. 822.043.291.950,- yang meliputi belanja-belanja sebagai berikut :

- 1) Belanja pegawai dianggarkan untuk membiayai belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan

lainya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai juga dianggarkan untuk membiayai uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2014 untuk belanja ini dianggarkan sejumlah Rp. 728.676.919.951,-

- 2) Belanja hibah, dianggarkan untuk membiayai pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peraturanya. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib dalam arti bahwa pemberian hibah tersebut ada batasnya tergantung kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan yang dibiayai dari hibah tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada tahun 2014 untuk belanja ini dianggarkan sejumlah Rp. 32.104.250.000,-
- 3) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, yang diberikan secara selektif, tidak terus menerus/meningkat, dan memiliki kejelasan peruntukannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2014 untuk belanja pegawai ini dianggarkan sejumlah Rp. 4.802.122.000,-
- 4) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainya atau pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainya dalam rangka pemerataan dan/atau

peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan, sedang bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan kepada partai politik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku merupakan belanja bantuan keuangan. Pada tahun 2014 untuk belanja pegawai ini dianggarkan sejumlah Rp. 4.802.122.000,-

- 5) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelum yang telah ditutup. Pada tahun 2014 untuk belanja pegawai ini dianggarkan sejumlah Rp. 2.500.000.000,-

b. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja langsung tahun 2014 dianggarkan sejumlah Rp. 703.063.166.469,- yang terdiri dari jenis belanja sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai

Merupakan belanja yang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran untuk pembayaran honorarium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang secara keseluruhan pada tahun 2014 dianggarkan sejumlah Rp. 16.397.374.032,-

- 2) Belanja Barang dan Jasa

Dianggarkan untuk membiayai pengeluaran pembelian /pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Belanja barang/jasa dimaksud berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat-alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung tahun 2014 dianggarkan sejumlah Rp. 322.210.792.587,-

3) Belanja Modal

Dianggarkan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya. Belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung tahun 2014 dianggarkan sejumlah Rp. 354.454.999.850,-

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2014, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 297.157.825.674,- dan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 263.893.856.674,- yang direncanakan untuk menutup deficit anggaran tahun 2014.

Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKJIP

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja. Pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diharapkan mampu mendorong perbaikan bagi instansi pemerintah dalam hal:

1. Penetapan prioritas program yang lebih mengarah pada kunci permasalahan pokok;
2. Mengurangi terjadinya duplikasi anggaran dengan penetapan kinerja yang terukur dan berkelanjutan;

3. Mendorong pengembangan mekanisme pencatatan dan pemanfaatan sumber daya yang akurat;
4. Mendorong akurasi penyusunan anggaran;
5. Mencegah penggunaan anggaran untuk sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
6. Tersedianya sarana, prasarana dan metode kerja dalam pengendalian sistem manajemen yang lebih andal;
7. Tersedianya pelaporan/ informasi kinerja instansi pemerintah yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKJIP

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013, didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan gambaran umum Organisasi dan isu strategis yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2014.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan analisis atas hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2014 dan realisasi anggaran tahun 2014.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja yang akan datang.

Lampiran – lampiran

B. ISU STRATEGIS KABUPATEN WONOSOBO

Bidang penanggulangan kemiskinan:

- Perluanya keterpaduan antar sektor dalam penanggulangan kemiskinan.
- Perlunya grand design penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.
- Terbatasnya kesempatan kerja di daerah.
- Persentase penduduk miskin yang masih cukup tinggi.
- Kualitas pencari kerja yang masih rendah baik pendidikan maupun ketrampilannya.

Bidang pendidikan:

- Peningkatan akses pada pendidikan yang murah dan berkualitas.
- Peningkatan SDM pendidik.
- Peningkatan life skill melalui pendidikan.

Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana:

- Peningkatan akses pada kesehatan yang murah dan berkualitas
- Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.
- Peningkatan kualitas makanan dan minuman yang sehat bagi masyarakat.
- Menurunnya persentase KB aktif.
- Rasio penyuluh KB dengan desa dan kelurahan yang ditangani masih cukup tinggi.
- Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dalam satu tahun terakhir.

Bidang Infrastruktur:

- Usia paka jalan yang rendah/ kualitas pembangunan rendah.
- Keterbatasan kemampuan pengawasarn.
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur seringkali tidak sesuai jadwa/perencanaan.
- Kondisi geografis wilayah dengan curah hujan yang cukup tinggi.
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur belum dioptimalkan.

Bidang pertanian dan ketahanan pangan:

- Berkurangnya luas lahan tanam khususnya padi.
- Menurunnya jumlah keluarga tani.
- Menurunnya jumlah tenaga kerja di sector pertanian.
- Belum optimanya peran pemerintah dalam upaya npeningkatan produksi dan produktivitas di sector pertanian.
- Rendahnya produksi benih unggul di sector perikanan.
- Pengelolaan dan pemanfaatan balai benih masih jauh dari optimal.
- Sebagaian pelaku usaha sector peternakan masih melakukan usaha ternak sebagai sampingan

Bidang Konsolidasi Reformasi Birokrasi

- Peningkatan tata kelola asset milik daerah yang lebih baik dan akuntabel.
- Peningkatan PAD dalam mendukung sumber daya keuangan daerah.
- Belum optimalnya fungsi perencanaan baik di tingkat SKPD maupun di tingkat kabupaten.
- Revitalisasi fungsi perencanaan dalam struktur kelembagaan daerah.
- Perlunya komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih kongkrit.

Bidang iklim investasi dan usaha:

- Regulasi bidang penanaman modal dan perijinan yang masih perlu diperbaharui, termasuk penyederhanaan proses perijinan.
- Perlu didesain penanaman modal dan perijinan dalam satu pintu.
- Peningkatan daya saing daerah dibidang investasi.
- Peningkatan kualitas dan ketrampilan bagi tenaga kerja lokal.
- Peningkatan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan investasi di Wonosobo.
- Peningkatan koordinasi antar SKPD juga perlu diperkuat terkait peningkatan potensi dan daya saing daerah agar SKPD mempunyai peran dan kontribusi yang lebih jelas bagi arah pengembangan investasi di Wonosobo. Identifikasi potensi investasi dari masing-masing SKPD sesuai dengan bidang tugasnya perlu disinergikan sehingga Wonosobo memiliki data potensi investasi yang lebih komprehensif.

Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral:

- Pemanfaatan energi alternative masih sangat terbatas.
- Belum terkelolanya potensi mikro sebagai sebuah peluang usaha yang menguntungkan.

Bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana:

- Tingginya eksploitasi lingkungan baik dal sector pertanian maupun pertambangan.
- Wilayah Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar berada pada wilayah konservasi.
- Banyaknya titik rawan bencana.
- Kesadaran pelestarian lingkungan yang masih rendah pada sebagian masyarakat.
- Belum terbentuknya lembaga yang secara spesifik menagani bencana.

Bidang kawasan tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh

- Ketrediaan infrastruktur yang masih rendah di daerah perbatasan.
- Tingginya jumlah rumah tidak layak huni.
- Munculnya pemukiman di wilayah yang tidak layak huni.

Bidang kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi:

- Belum tersedianya pola pengembangan kebudayaan daerah.
- Terbatasnya SDM dalam bidang kebudayaan.
- Terbatasnya wadah pengembangan kreativitas yang difasilitasi pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014

A. PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2014 merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo periode tahun 2010-2015. Mengacu pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Wonosobo periode tahun 2010-2015 adalah *"Wonosobo yang lebih Maju dan Lebih Sejahtera"*. Dari visi tersebut, tujuan umum yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah mencapai kemajuan pembangunan diberbagai bidang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih sejahtera dimaknai bahwa pembangunan daerah bukan hanya untuk kemajuan dan kemandirian, tetapi juga untuk kesejahteraan yaitu suatu kondisi yang semakin baik dan damai dalam arti semakin adil dan tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun

Merujuk pada dokumen perencanaan strategis yang ada kemajuan diberbagai bidang tersebut dijabarkan dan dimakanai sebagai berikut:

1. Bidang sosial diukur dengan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kepibadian bangsa,

akhlak mulia, berkualitas, berpendidikan yang tinggi, dengan derajat kesehatan yang baik dan produktifitas yang tinggi.

2. Bidang ekonomi, diukur dari kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang tinggi dan distribusinya yang merata.
3. Kemajuan di bidang politik dan hukum diukur dari semakin mantapnya lembaga politik dan hukum yang tercermin dari berfungsinya lembaga politik dan kemasyarakatan sesuai konstitusi, meningkatnya peran aktif masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan Misi Pembangunan 2010 - 2015 sebagai upaya yang diperlukan untuk mencapai visi Wonosobo 2015 tersebut. Mewujudkan Wonosobo yang semakin Maju dan Sejahtera, tidak terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global, nasional dan regional selama kurun waktu 2010-2015. Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan agar dinamika yang terjadi tidak terlambat direspon oleh Pemerintah kabupaten Wonosobo.

Misi pemerintah dalam periode 2010 - 2015 diarahkan untuk mewujudkan Wonosobo yang lebih maju dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum menuju kemandirian daerah. Usaha-usaha perwujudan Visi Wonosobo 2015 dijabarkan dalam misi tahun 2010 - 2015 sebagai berikut :

1. Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera.
2. Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah.
3. Meningkatkan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah.
5. Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang.

Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2015 dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan misi sebagaimana tertuang pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut disusun dalam kerangka pencapaian visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo 2010 - 2015, dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas agar lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Pembangunan Daerah ini bertujuan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Wonosobo di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang meliputi:

Penanggulangan Kemiskinan

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, melalui Optimalisasi pelaksanaan program pemerintah Bantuan Sosial Terpadu, PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat.
- b. Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, melalui Revitalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- c. Peningkatan perluasan dan pengembangan Kesempatan Kerja, melalui pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.
- d. Perlindungan dan jaminan sosial, melalui Penyediaan sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
- e. Pengembangan usaha masyarakat, melalui Peningkatan pemerataan distribusi kepemilikan modal material kepada seluruh masyarakat dan Peningkatan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengelola produk-produk potensial daerah baik dalam bidang permodalan, produksi maupun pemasaran.

- f. Kerjasama Pembangunan, melalui Penguatan kerjasama antara Wonosobo – Perguruan Tinggi – Pelaku Usaha / *BIG Partnership* dalam pengembangan produk-produk potensial daerah (pertanian, usaha mikro kecil dan menengah, serta pariwisata).

Pendidikan

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah, melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan fasilitasi rintisan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.
- b. Pendidikan berkelanjutan, melalui Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia.
- c. Manajemen Pelayanan Pendidikan, melalui pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance*, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan, serta Penataan ulang kurikulum sekolah yang menjadi urusan daerah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model *link and match*).
- d. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pengelolaan dan layanan sekolah.

Kesehatan

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat, melalui pelaksanaan program kesehatan preventif terpadu yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada balita; Penyediaan akses sumber air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas; Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan, serta tingkat kematian bayi; Menjamin ketercukupan kebutuhan obat ; Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit, puskesmas dan PKD; dan Penerapan Asuransi Kesehatan Daerah tidak hanya untuk keluarga miskin tetapi kepada seluruh keluarga.
- b. Program Keluarga Berencana, melalui Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta;

Infrastruktur

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Peningkatan prasarana publik, melalui konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu;
- b. Pembangunan dan rehabilitasi jalan, melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan jalan antar kecamatan dan antar desa.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, melalui pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antar wilayah yang terintegrasi untuk mendorong penurunan tingkat kecelakaan transportasi.
- d. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, melalui pembangunan prasarana pengendalian bencana pada kawasan-kawasan rawan bencana.
- e. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa, melalui maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi masyarakat.

- f. Peningkatan pelayanan angkutan dan perhubungan, melalui perbaikan sistem dan jaringan transportasi didalam kota Wonosobo, Kertek, Sapuran, Garung, Kaliwiro dan transportasi pedesaan.

Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, melalui revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.
- b. Pembangunan/ rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana pengairan, yang melayani sentra-sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian.
- c. Peningkatan produktifitas pertanian, melalui peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian yang tinggi; mendorong untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau;
- d. Peningkatan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan melalui peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan, melalui peningkatan pola pangan harapan;
- e. Pengendalian dampak perubahan iklim, melalui pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

Konsolidasi dan Reformasi birokrasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Penataan Kelembagaan, melalui restrukturisasi, konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas SKPD yang menangani urusan pemerintahan daerah.
- b. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan alokasi dana desa, penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, peningkatan kapasitas pemerintahan desa; serta penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
- c. Pembinaan dan pengembangan aparatur, melalui penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi serta kesejahteraan PNS .
- d. Penataan Peraturan Perundang-undangan, melalui percepatan evaluasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah.
- e. Penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan, melalui peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan peraturan daerah oleh seluruh lembaga dan aparat hukum.
- f. Penataan Administrasi Kependudukan, melalui penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk.

Iklim investasi dan usaha

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Penataan perundang-undangan, melalui reformasi regulasi secara bertahap sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya; serta Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja,

- b. Peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi dan investasi, melalui penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan pengurangan biaya untuk memulai usaha.

Energi dan Sumber Daya Mineral

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Pengembangan Ketenagalistrikan dan energi, melalui percepatan penyediaan jaringan listrik pada kawasan-kawasan yang belum berlistrik.
- b. Pengembangan Energi Alternatif Tepat Guna, melalui peningkatan pengembangan energi terbarukan termasuk energi alternatif tenaga surya dan *microhydro*,
- c. Pengembangan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup, melalui konversi kegiatan pertambangan kepada kegiatan yang nilai ekonominya tinggi dan tidak merusak lingkungan; serta rehabilitasi lahan pasca pertambangan.

Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Pengendalian dampak perubahan iklim, melalui peningkatan hasil rehabilitasi lahan kritis, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh,
- b. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, melalui penurunan beban pencemaran lingkungan, melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di kegiatan industri dan jasa, penurunan tingkat polusi, Penghentian kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana;

- c. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, melalui penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Bencana dan Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Sistem Peringatan Dini Iklim; serta peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana, pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di lokasi strategis yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten.

Kawasan Tertinggal, Terbelakang, Perbatasan dan Kumuh

Program aksi yang akan dilakukan :

- a. Penataan perundang-undangan, melalui pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh.
- b. Kerjasama daerah melalui pembentukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga dalam rangka percepatan pertumbuhan di daerah tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh.

Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Program aksi yang akan dilakukan :

- a. Pengelolaan Kekayaan Budaya, melalui penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, museum dan perpustakaan, serta pelestarian budaya.
- b. Pengembangan Nilai seni dan Budaya, melalui penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; serta Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya.

- c. Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, melalui peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

B. PERJANJIAN KINERJA

Program prioritas pembangunan 2010-2015 yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, merupakan arah dalam penyusunan penetapan kinerja tahun 2014. Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2014 pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menyusun dokumen penetapan kinerja yang berisi sasaran dan target kinerja selama satu tahun.

Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan kinerja merupakan tahapan penting yang sangat berpengaruh pada tahapan selanjutnya. Selain sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan selama satu tahun kedepan, dokumen penetapan kinerja menjadi alat ukur/ pembanding atas capaian kinerja aktual atas kinerja instansi pemerintah. Penetapan kinerja ini disusun dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan dan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya.

Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dokumen penetapan kinerja berisi sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada *outcome* atau *out* penting. Selain itu, dokumen penetapan kinerja juga disusun dengan mendasarkan pada dokumen perencanaan strategis daerah (RPJMD) pemerintah Kabupaten Wonosobo. Penentuan target kinerja dalam dokumen penetapan kinerja didasarkan pada sumber daya

pembangunan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2014 dan capaian kinerja tahun 2013.

Sehingga beberapa capaian kinerja yang pada tahun 2013 belum sesuai dengan target kinerjanya, maka target kinerja tersebut masih menjadi target untuk tahun 2014. Sebaliknya, capaian kinerja yang jauh melebihi target pada tahun 2013, juga menjadi pertimbangan penting dalam penetapan kinerja tahun 2014. Melalui proses tersebut diharapkan dapat dirumuskan target kinerja yang lebih rasional dan *achievable*. Berikut ini penetapan kinerja yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo pada awal tahun 2014:

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014

NO.	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014
1	PENANGGULANGAN KEMISKINAN		
	Penanggulangan kemiskinan.	Persentase penduduk miskin	18
	Peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	75
		Tingkat pengangguran terbuka	3.34
2	PENDIDIKAN		
	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah	Pendidikan dasar 9 Tahun	
		APM SD/MI	94
		APK SD/MI/Sederajat	104
		APM SMP/MTs/Paket B	78
		APK SMP/MTs/Paket B	97
		Angka lulus SMP/MTS	99.7
		Angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTS	96
		Pendidikan Menengah	
		APK SMA/SMK/MA	53

		APM SMA/SMK/MA	42
		Angka putus Sekolah SMA/SMK/MA	0.8
		Prosentase kelulusan SMA/SMK/MA	98
3	KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		
	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat		
		Prosentase desa/kelurahan UCI	100
		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	99.25
		Persentase penduduk memiliki jamban sehat	75
		Persentase kualitas makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	75
		Persentase rumah tangga sehat	70
		Persentase PKD aktif	90
		Persentase tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan	100
		Persentase pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	100
		Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100
	Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB		
		% KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR)	86.72
		% drop out KB	7.68
		Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Baru	29.217
		Rasio penyuluh/petugas KB dengan desa/kelurahan	1:3
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk		

		Angka penurunan TFR	2.10
		Angka penurunan laju penduduk	0.99
4	INFRASTRUKTUR		
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten		
		Panjang jalan kondisi baik antara ibukota kabupaten - kecamatan (Km)	193.36
		Panjang jalan kondisi baik antar ibukota kecamatan (km)	196.76
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jembatan	% Jumlah jembatan kondisi baik	75.53
	Meningkatnya kapasitas pelayanan invfrastruktur jalan desa	Jumlah panjang jalan desa kondisi baik (km)	43.50
5	PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama		
		Persentase ketersediaan bahan pangan utama	100
		Tingkat skor pola harapan pangan	98
	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan hortikultura		
		Produksi Tanaman pangan (ton)	
		- Padi	149.771
		- Jagung	115.101
		- Ketela Pohon	193.389
		- Ubi Jalar	18.785
		Produktifitas Tanaman pangan (ton/ hektare)	
		- Padi	5.1
		- Jagung	4
		- Ketela Pohon	31.28
		- Ubi Jalar	18.785
		Produksi tanaman hortikultura	
		- Kentang	49.44

		- Kubis	67.776
		- Bawang Daun	28.572
		- Cabe	7.785
		- Wortel	9.040
		- Salak	41.523
		Produktifitas tanaman hortikultura	
		- Kentang	15.19
		- Kubis	17.02
		- Bawang Daun	11.33
		- Cabe	7.2
		- Wortel	13.8
		- Salak	0.198
	Meningkatnya populasi dan produksi hasil peternakan-perikanan		
	Meningkatnya produksi ikan budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton)	5,652
	Meningkatnya produksi benih unggul	Produksi benih BBI	2.990 kg
	Meningkatnya populasi ternak dan hasil produksi peternakan		
		Populasi ternak	
		Sapi	33,941
		Kambing	154.120
		Domba	93.115
		Kerbau	3,936
		Ayam buras	726.094
		Ayam petelur	84.475
		Sapi perah	1.077
		Kelinci	32,770
		Entog	46,496
		Puyuh	192,526
		Produk ternak (ton)	
		a. Daging (kg)	6.297.677
		b. Telur (kg)	2.239.896
		c. Susu (Kg)	966.487
	Meningkatnya layanan irigasi teknis		
		% Daerah Irigasi dalam kondisi baik	80

		Rasio Panjang Saluran Irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani	20.93
6	KONSOLIDASI DAN REFORMASI BIROKRASI		
	Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		
		Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WDP
		% Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	97
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	% kenaikan pendapatan Asli Daerah	20
	Meningkatnya kualitas sistem perencanaan		
		Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100
		Prosentase kesesuaian program/ kegiatan RKPD dengan APBD	100
		Prosentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD	100
		Prosentase kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD	100
	Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil		
		% kepemilikan KTP berbasis NIK	100
		% kepemilikan KK	100
		% kepemilikan Akta kelahiran	95
		% Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran	95
7	IKLIM INVESTASI DAN USAHA		
	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah investasi	767
		Nilai Investasi (Investasi)	145.6

8	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
	Meningkatnya penggunaan energi alternatif	Jumlah Ijin usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif yang diterbitkan	3
	Terpenuhinya kebutuhan energi listrik		
		% rumah tangga yang menggunakan listrik (elektrifikasi)	100
		Rasio penyediaan daya listrik terhadap kebutuhan	109
9	LINGKUNGAN HIDUP DAN PENAGGULANGAN BENCANA		
	Berkurangnya lahan kritis	% luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas total hutan dan lahan kritis	9.53
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air		
		Kualitas / kelas air	1
		% kelestarian sumber air	70
		% peningkatan debit sumber air	6
	Berkurangnya resiko bencana		
		% jumlah meninggal akibat bencana	1
		%Tertanganinya dampak bencana	100
10	KAWASAN TERTINGGAL, TERBELAKANG, PERBATASAN DAN KUMUH		
	Optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah	% penegasan batas kabupaten	100
	Meningkatnya pemanfaatan SDA untuk penataan lingkungan yang sehat		
		Prosentase desa yang memiliki fasilitas air bersih	100
		Area pemukimankumuh yang tertangani	100

		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	3.000
11	KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI		
	Meningkatnya internalisasi nilai - nilai budaya		
		Jumlah penelitian yang dilaksanakan dibidang arkeologi	2
		Jumlah karya seni yang berkualitas	4
	Meningkatnya kreativitas dan produktivitas pelaku budaya		
		Jumlah pelaku budaya yang memperoleh penghargaan	5
		Jumlah karya budaya yang memperoleh perlindungan HAKI	15
	Meningkatnya penggunaan teknologi produksi tepat guna	Jumlah IK yang telah memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	620

Penjelasan Atas Dokumen Penetapan Kinerja

Dari sebelas prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo, untuk target kinerja tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

▪ Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Target kinerja prioritas ini dari tiga indikator kinerja yang digunakan, untuk indikator persentase penduduk miskin target kinerjanya 18 persen atau sama dengan target kinerja tahun 2013. Ini karena target tersebut belum mampu terealisasi sampai dengan akhir 2013. Karena capaian kinerja tahun 2013 hanya mencapai 80 persen dari target. Pada indikator tingkat partisipasi angkatan kerja target yang ditetapkan sebesar 75 persen, sama dengan target dalam RPJMD. Sedangkan untuk indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka, pada tahun 2014 juga masih sama dengan target kinerja tahun 2013 yakni sebesar 3.34 persen. Hal ini karena realisasi atas target tersebut pada tahun 2013 baru mencapai 62.20 persen dari target kinerja yang ditetapkan.

- **Prioritas Bidang Pendidikan**

Untuk prioritas bidang pendidikan dengan sasaran strategis meningkatnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun target kinerja mengalami kenaikan pada satu indikator yaitu APK SD/MI/Sederajat yang pada tahun 2013 capaian kinerjanya telah melampaui target. Sedangkan indikator yang lain targetnya masih sama dengan target tahun 2013 karena belum tercapai pada tahun 2013. Target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2014 juga mengacu pada target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo.

- **Prioritas Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Pada bidang kesehatan dan keluarga berencana, target kinerja juga ditetapkan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya, target kinerja dalam dokumen RPJMD dan sumber daya yang ada untuk pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana pada tahun 2014. Untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat, target kinerja lebih mendasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2013 kinerja untuk sasaran ini mencapai 94.5 persen, dengan capaian pada beberapa indikator melebihi target kinerja tahun 2013 yang ada dalam dokumen RPJMD.

Untuk sasaran peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB, target kinerja mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sehingga target kinerja mengalami peningkatan pada hampir semua indikator kinerja.

- **Prioritas Bidang Infrastruktur**

Target kinerja bidang infrastruktur untuk tahun 2014 sebagian besar lebih tinggi dari capaian tahun 2013. Hal tersebut dilakukan seiring dengan prioritas pembangunan tahun 2014 dan agenda untuk menyelesaikan sebagian target bidang infrastruktur pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD. Melalui beberapa evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2013 diharapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2014 akan lebih efektif untuk mencapai kinerja yang ditetapkan.

- **Prioritas Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Pada bidang pertanian dan ketahanan pangan, untuk sasaran ketersediaan bahan pangan utama dengan indikator persentase ketersediaan bahan pangan utama dan tingkat skor pola harapan pangan, target kinerja yang digunakan berdasarkan target dalam RPJMD. Dengan capaian kinerja mencapai 97 persen pada tahun 2013, diharapkan target kinerja tahun 2014 juga akan tercapai dengan baik.

Sedangkan untuk sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan dan hortikultura, target kinerja tahun 2014 lebih mendasarkan pada capaian tahun 2013. Dengan asumsi akan ada peningkatan capaian dibanding dengan realisasi tahun 2013. Dalam konteks sasaran ini faktor musim menjadi salah satu faktor yang cukup dominan sehingga dengan kondisi tersebut, target kinerja tahun 2014 juga disusun dengan asumsi cuaca dan musim yang tidak berbeda dengan kondisi tahun 2013.

Untuk sasaran strategis meningkatnya populasi ternak dan hasil produksi peternakan, target kinerja tahun 2014 didasarkan pada capaian kinerja tahun 2013 yang mencapai 86 persen dan target yang ada dalam dokumen RPJMD sebagai pembanding. Karena beberapa indikator capaiannya sudah melebihi target dalam RPJMD untuk tahun 2013. Sehingga akan diperoleh target kinerja yang lebih *reasonable*. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya layanan irigasi teknis target tahun 2014 masih sama dengan target tahun 2013 karena target tahun 2013 belum mampu dicapai sampai dengan akhir tahun.

- **Prioritas Bidang Konsolidasi dan Reformasi Birokrasi**

Pada sasaran bidang konsolidasi dan reformasi untuk sasaran efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah target kinerja mengacu pada target dalam dokumen RPJMD dan capaian kinerja tahun 2013 dengan kecenderungan target diatas realisasi tahun 2013. Demikian juga untuk sasaran meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil. Sehingga diharapkan target kinerja yang

ditetapkan akan mampu meningkatkan kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil secara simultan.

- **Prioritas Bidang Iklim Investasi dan Usaha**

Sasaran strategis bidang ini adalah meningkatnya investasi daerah yang diukur dari indikator jumlah investasi dan nilai investasi. Target kinerja untuk sasaran ini mengikuti target yang ada dalam dokumen RPJMD yang cenderung menetapkan target yang meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun. Hal ini juga mengingat Kabupaten Wonosobo yang masih terbatas kapasitasnya dalam hal investasi. Karena kondisi sebagai daerah pertanian dengan pertanian rakyat sebagai tulang punggungnya.

- **Prioritas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Untuk bidang energi dan sumber daya mineral penetapan target kinerja pada dua sasaran strategisnya mengacu pada target kinerja pada RPJMD, realisasi kinerja tahun 2013 serta rencana pelaksanaan program pembangunan tahun 2014. Target kinerja pada indikator jumlah ijin usaha pemanfaat dan pengelolaan energi alternatif masih sama dengan target kinerja tahun 2013 karena capaian kinerja pada tahun 2013 capaiannya baru 33 persen dari target. Sedangkan untuk persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dan rasio penyediaan daya listrik mengacu pada dokumen RPJMD.

- **Prioritas Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana**

Target kinerja untuk bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana mengacu pada realisasi kinerja tahun 2013. Dimana pada tahun 2013 capaian kinerja bidang ini mencapai 113 persen. Sehingga untuk tahun 2013 dengan target yang ditetapkan diatas capaian kinerja tahun 2013 akan mendorong peningkatan kualitas pembangunan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana di Kabupaten Wonosobo.

- **Prioritas Bidang kawasan tertinggal, terbelakang, perbatasan dan Kumuh**

Sasaran strategis bidang ini meliputi optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah dan meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam untuk penataan lingkungan yang sehat. Penetapan target kinerja untuk sasaran tersebut mengacu pada realisasi capaian kinerja tahun 2013. Dimana capaian kinerja pada akhir tahun 2013 mencapai 113.5 persen. Target tersebut juga lebih tinggi dari target dalam dokumen RPJMD.

- **Prioritas Bidang Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi**

Pada bidang kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dengan sasaran strategis meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya dan meningkatnya kreativitas dan produktivitas pelaku budaya, target kinerja yang ditetapkan masih sama dengan target kinerja tahun 2013. Hasil capaian kinerja tahun 2013 untuk dua sasaran strategis sudah cukup baik namun masih perlu peningkatan kualitasnya. Sedangkan untuk sasaran strategis meningkatnya penggunaan teknologi produksi tepat guna dengan melihat relaisasi tahun lalu mencapai 92 persen maka target kinerja tahun 2014 dipertahankan dengan pertimbangan pada tahun 2013 telah dianggarkan program untuk mempercepat penerapan teknologi tepat guna pada IKM-IKM di Kabupaten Wonosobo.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo diperoleh dari pengukuran kinerja atas pertanyaan kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan tahapan untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun. Melalui pengukuran kinerja realisasi dari masing-masing indikator kinerja dapat diketahui tingkat ketercapaiannya.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga relevan untuk melihat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun dalam mendukung pencapaian target kinerja. Pengukuran pada akhir tahun anggaran mencerminkan hasil akhir dari proses pembangunan yang telah dilakukan dalam tahun 2014.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dengan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran. Sehingga pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan.

Proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau *outcome* ataupun out penting. Tidak sebatas pada proses pelaksanaan program/kegiatan agar pengukuran kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang sesungguhnya. Indikator kinerja *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu lembaga dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran kinerja.

Skala pengukuran dibuat berdasarkan pertimbangan masing – masing lembaga, antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Skala	Kategori				
86 s/d 100	Baik		Sangat Baik		Sangat Berhasil
70 s/d 85	Sedang	Atau	Baik	Atau	Berhasil
55 s/d 69	Kurang		Sedang		Cukup Berhasil
Kurang dari 55	Sangat Kurang		Kurang Baik		Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 dilakukan terhadap dokumen penetapan kinerja yang telah disusun pada awal Tahun 2014. Dimana penetapan kinerja tahun 2014 mengacu pada target kinerja jangka menengah dalam RPJMD, hasil capaian kinerja tahun sebelumnya dan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan tahun 2014.

Berdasarkan pengukuran secara mandiri (*self asassment*) atas sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014, diperoleh hasil pengukuran terhadap capaian kinerja prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA (%) TAHUN 2014
1.	Penanggulangan Kemiskinan	78.25
2.	Pendidikan	90.65
3.	Kesehatan dan Keluarga Berencana	87.80
4.	Infrastruktur	92.30
5.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	95.00
6.	Konsolidasi dan Reformasi Birokrasi	131.17
7.	Iklim dan Investasi Usaha	125.50
8.	Energi dan Sumber Daya Mineral	66.50
9.	Lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana	94.00
10.	Kawasan Tertinggal, Terbelakang, Perbatasan dan Kumuh	121.80
11.	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi	45.00
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA		93.45

Dari sebelas bidang prioritas pembangunan, hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian kinerja rata-rata tahun 2014 sebesar 93.45 persen. Hasil tersebut menunjukkan pada tahun 2014 adanya peningkatan capaian dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013. Tabel berikut memperlihatkan perbandingan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam tiga tahun terakhir:

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA (%)		
		2014	2013	2012
1.	Penanggulangan Kemiskinan	78.25	81.80	97
2.	Pendidikan	90.65	87.85	94.15
3.	Kesehatan dan Keluarga Berencana	87.80	96	92.6
4.	Infrastruktur	92.30	68.80	54.04
5.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	95.00	85.31	101.73
6.	Konsolidasi dan Reformasi Birokrasi	131.17	101.42	103
7.	Iklim dan Investasi Usaha	125.50	100	107.15
8.	Energi dan Sumber Daya Mineral	66.50	59.50	59.25
9.	Lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana	94.00	113	120.66
10.	Kawasan Tertinggal, Terbelakang, Perbatasan dan Kumuh	121.80	113.50	106.5
11.	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi	45.00	91.70	72.4
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA		93.45	90.80	91.68

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2013 terlihat adanya peningkatan realisasi kinerja sebesar 2.65 persen. Hasil tersebut dipengaruhi oleh kenaikan pada tujuh prioritas yang mengalami kenaikan pada tahun 2014. Sedang empat prioritas terjadi penurunan capaian dibandingkan realisasi tahun 2013. Selengkapnya terkait realisasi kinerja dan analisisnya akan dijelaskan dalam bagian berikut.

Analisis atas capaian kinerja masing-masing bidang prioritas

Prioritas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas ini mencakup dua sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu:

- 1) Penanggulangan kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tahun 2014 kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ❖ Pada tahun 2014 sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo adalah menurunkan persentase penduduk miskin dengan target kinerja sebesar 18 persen. Sampai dengan akhir 2014 realisasi atas target baru mencapai 81.5 persen dengan persentase penduduk miskin sampai dengan akhir tahun 2014 sebesar 22.08 persen. Kesenjangan antara target dengan realisasi untuk persentase penduduk miskin sebesar 4.08 persen.
- ❖ Dibandingkan dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya maka akan terlihat seperti dalam tabel berikut:

INDIKATOR	REALISASI		
	2014	2013	2012
Persentase penduduk miskin	22.08	22.53	24.21

Sumber data: BPS Kab. Wonosobo

Dari tabel di atas terlihat bahwa tahun 2014 persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0.45 persen bila dibandingkan dengan kondisi pada periode yang sama tahun 2013. Meskipun terjadi penurunan tetapi bila dilihat tingkat penurunannya dibandingkan capaian tahun sebelumnya maka terlihat tingkat penurunan tahun 2014 lebih kecil dibanding penurunan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 tingkat penurunan persentase penduduk miskin mencapai 1.68 persen sedangkan tingkat penurunan pada tahun 2014 sebesar 0.45 persen.

- ❖ Sedangkan jika dibandingkan dengan target yang ada dalam dokumen RPJMD maka kesenjangannya masih cukup jauh. Dalam RPJMD ditetapkan target sampai dengan akhir 2015 persentase penduduk miskin hanya 10 persen. Bahkan sampai dengan akhir tahun 2014 target untuk tahun pertama RPJMD belum tercapai. Pada tahun pertama (tahun 2011) RPJMD target persentase penduduk miskin sudah 20 persen sedangkan kondisi sampai akhir tahun 2014 masih 22.08 persen.
- ❖ Target kinerja penurunan persentase penduduk miskin sebesar 18 persen adalah target tahun kedua yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Melihat tren penurunan selama tiga tahun terakhir terlihat bahwa target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dalam tiap tahunnya terlalu senjang dengan kemampuan Kabupaten Wonosobo dalam merealisasikannya. Beberapa hal penting terkait capaian tersebut antara lain penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan metode pemberdayaan seringkali dampaknya belum bisa dilihat dalam jangka pendek. Pemberdayaan ekonomi produktif sebagai upaya penanggulangan kemiskinan sering tidak berkorelasi langsung dengan penurunan angka kemiskinan. Kenaikan harga pokok yang juga diikuti dengan harga-harga kebutuhan lainnya seringkali lebih dominan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Kondisi tersebut memang menantang pemerintah untuk harus selalu kreatif dan inovatif dalam upaya penanggulangan

kemiskinan. Ketika harga naik, daya beli masyarakat cenderung menurun, ketika ini terjadi produk yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok ekonomi produktif yang sebagian besar bukan berupa kebutuhan pokok seringkali harus menjadi korban karena bukan merupakan prioritas bagi masyarakat sebagai konsumennya. Keterpaduan program-program penanggulangan kemiskinan perlu terus ditingkatkan. Sehingga mampu saling bersinergi dan berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan. Perlu dibangun satu kesadaran dan pemahaman bahwa masyarakat miskin selalu berhadapan dengan situasi yang kompleks. Miskin sumber daya, miskin akses dan juga seringkali miskin motivasi dan relatif tidak banyak pilihan bagi mereka dalam mengembangkan sumber daya ekonominya. Dalam kaitan ini, pemerintah kabupaten perlu mengidentifikasi peran yang dilakukan masing-masing sektor dengan lebih tajam dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keterbatasan sumber daya manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga masih menjadi tantangan yang cukup penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keterhubungan manajemen birokrasi dengan kondisi riil dimasyarakat masih perlu terus dicarikan bentuknya dalam manajemen birokrasi yang melayani masyarakatnya.

- ❖ Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengembangkan beberapa program pembangunan yang diharapkan mampu mendorong penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo. Program-program yang dilaksanakan pada Tahun 2014 antara lain program pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, pemugaran rumah tidak layak huni, fasilitasi percepatan pembangunan pedesaan, pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin. Selain itu program pengembangan dan peningkatan akses layanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar ke tingkat desa juga diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat miskin, selain program-program untuk peningkatan produktivitas masyarakat miskin.

Namun demikian, upaya yang telah dilakukan tersebut harus diakui belum mampu menjawab semua kebutuhan dan tuntutan di lapangan. Salah satu poin penting yang masih perlu terus ditingkatkan adalah keterpaduan upaya penanggulangan kemiskinan yang bersifat multi sektoral. Karena pada kenyataannya kemiskinan tidak hanya bisa didekati secara sektoral.

2) Peningkatan kesempatan kerja

Capaian sasaran strategis ini diukur dari dua indikator kinerja yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Tahun 2014 target kinerja untuk indikator tingkat partisipasi angkatan kerja ditetapkan 75 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3.34 persen. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ❖ Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerjanya pada tahun 2014 peningkatan kesempatan kerja realisasinya mencapai 75 persen. Perhitungan ini diperoleh dari pengukuran atas dua indikator kinerja yang digunakan yaitu: Pertama, tingkat partisipasi angkatan kerja target kinerja yang ditetapkan 75 persen capainnya hanya 69.50 persen atau realisasi kinerjanya 93 persen. Kedua, tingkat pengangguran terbuka target kinerjanya sebesar 3.34 persen, tetapi realisasinya mencapai 5.83 persen, sehingga capaian kinerjanya hanya 57 persen.
- ❖ Dibandingkan dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya maka akan terlihat seperti dalam tabel berikut:

INDIKATOR	REALISASI		
	2014	2013	2012
Tingkat partisipasi angkatan kerja	69.50	76	72
Tingkat pengangguran terbuka	5.83	5.37	5.04

Sumber data: BPS Kab. Wonosobo

Dari tabel di atas terlihat bahwa tahun 2014 capaian kinerja Kabupaten Wonosobo pada dua indikator yang diukur mengalami penurunan. Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2014 diikuti dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir partisipasi angkatan kerja menurun sebesar 6.74 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan 0.46 persen.

- ❖ Sedangkan jika dibandingkan dengan target yang ada dalam dokumen RPJMD terlihat untuk tingkat partisipasi angkatan kerja sudah melampaui target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2015. Karena target dalam RPJMD hanya 45 persen. Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka realisasi tahun 2014 masih jauh dari target dalam RPJMD yang ditetapkan 2.98 persen. Mencermati target kinerja RPJMD dengan realisasi kinerja selama tiga tahun terakhir, memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi input untuk perbaikan target kinerja dalam RPJMD. Agar penetapan target lebih didasarkan pada kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam dokumen RPJMD juga ditemukan kondisi anomali dimana perbandingan untuk target dua indikator yang digunakan tidak saling menguatkan karena ketika target pengangguran terbuka rendah maka mestinya tingkat partisipasi angkatan kerjanya juga harus cukup tinggi. tidak hanya 45 persen.
- ❖ Kondisi kesempatan kerja di Kabupaten Wonosobo tahun 2014 apabila dibandingkan dengan kondisi di Jawa tengah dari dua indikator kinerja yang digunakan maka akan terlihat sebagai berikut:

INDIKATOR	Prov. Jateng	Kab. Wonosobo
Tingkat partisipasi angkatan kerja	70.93	69.50
Tingkat pengangguran terbuka	5.45	5.83

Sumber data: BPS Prov. Jateng

Dari tabel dapat dilihat jika pada tahun 2014 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Wonosobo lebih rendah dengan kondisi rata-rata di Provinsi Jawa Tengah. Sementara untuk tingkat pengangguran terbukanya, Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 lebih tinggi 0.38 poin dibanding rata-rata di Jawa Tengah.

- ❖ Menurut capaian kinerja peningkatan kesempatan kerja di Kabupaten Wonosobo tahun 2014 tidak lepas dari kondisi obyektif angkatan kerja yang ada saat ini. Dimana proporsi terbesar angkatan kerja berpendidikan sekolah dasar yang berpengaruh pada kualitas ketersediaan angkatan kerja. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2014 jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SD mencapai 69.41 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding proporsi tingkat provinsi dimana angkatan kerja yang berpendidikan SD hanya 52 persen. Kondisi tersebut menjadikan kesempatan kerja yang bisa diakses oleh sebagian pencari kerja di Kabupaten Wonosobo menjadi sangat terbatas. Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi andalan untuk menyerap angkatan kerja yang tersedia. Baik melalui angkatan kerja antar daerah maupun angkatan kerja antar provinsi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan perkebunan untuk membuka akses bagi pencari kerja disektor informal tersebut. Disamping itu juga untuk sektor formal sejak beberapa tahun terakhir telah diselenggarakan *job fair* untuk mempertemukan antara penyedia kerja dengan pencari kerja. Namun demikian upaya tersebut belum cukup optimal karena sebagian besar penyedia kerja mensyaratkan pencari kerja terampil dengan tingkat pendidikan minimal SLTA/ sederajat. Sehingga banyak kesempatan kerja yang pada akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh pencari kerja.

Salah satu solusi yang perlu dikembangkan adalah dengan mengefektifkan program-program pelatihan ketrampilan untuk

diproyeksikan pada pemenuhan kebutuhan sektor kerja formal. Pelatihan ketrampilan yang diselenggarakan BLK yang saat ini masih belum diorientasikan pada pemenuhan sektor formal, kedepan perlu dioptimalkan dalam penyiapan tenaga kerja terdidik dengan keahlian yang memadai.

- ❖ Program yang cukup menunjang peningkatan kesempatan kerja berdasarkan identifikasi lapangan yaitu program Perluasan dan Kesempatan Kerja dan Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kedua program tersebut cukup berpengaruh terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun disadari di tingkat pelaksanaan perlu terus dievaluasi dan dikembangkan sehingga lebih efektif dalam pencapaian target kinerja. Pertama dari sisi peningkatan kualitas tenaga kerja perlu desain program yang lebih jelas. Ada perbedaan antara yang diorientasikan pada penyiapan tenaga kerja terampil dan terdidik untuk sektor formal maupun yang diorientasikan untuk calon wirausahawan yang akan memanfaatkan ketrampilannya untuk melakukan usaha secara mandiri.

Prioritas Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah peningkatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah.

Capaian kinerja untuk pendidikan dasar 9 tahun diukur dari indikator:

- 1) APM SD/MI
- 2) APK SD/MI/ sederajat
- 3) APM SMP/MTs/Paket B
- 4) APK SMP/MTs/Paket B
- 5) Angka lulus SMP/MTS
- 6) Angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTS

- ❖ Perbandingan antara target dan capaian dari enam indikator tersebut pada tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja dari keenam indikator tersebut mencapai 95.8 persen. Capaian tertinggi pada indikator angka lulus SMP/MTS yang mencapai 99.5 persen dimana target tahun 2014 untuk angka lulus SMP/MTS adalah 99.7 persen dan capaiannya 99.25 persen. Sedangkan capaian terendah adalah indikator APM SMP/MTS/Paket B dengan capaian kinerja 90 persen. Dimana target tahun 2014 sebesar 78 persen tetapi realisasinya baru mencapai 70.13 persen. Secara lengkap capaian kinerja dari enam indikator untuk pendidikan dasar 9 tahun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Indikator	Target 2014	Realisasi 2014	Hasil (%)
APM SD/MI	94	91.7	97.5
APK SD/MI/Sederajat	104	103.35	99
APM SMP/MTs/Paket B	78	70.13	90
APK SMP/MTs/Paket B	97	91.13	94
Angka lulus SMP/MTS	99.7	99.25	99.5
Angka Melanjutkan ke SMP/MTS	96	91.03	95
Capaian rata-rata			95.8

Sumber data: Dikpora Kab. Wonosobo

- ❖ Capaian kinerja pendidikan dasar sembilan tahun apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

INDIKATOR	REALISASI		
	2014	2013	2012
APM SD/MI	91.7	91.44	90.13
APK SD/MI/Sederajat	103.35	104.15	102.11
APM SMP/MTs/Paket B	70.13	64.81	65.48
APK SMP/MTs/Paket B	91.13	86.13	86.42
Angka lulus SMP/MTS	99.25	96.45	93.91
Angka Melanjutkan ke SMP/MTS	91.03	88.49	89.78

Sumber data: Dikpora Kab. Wonosobo

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dari enam indikator yang

digunakan, lima indikator menunjukkan capaian tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2013. Hanya satu indikator yang mengalami sedikit penurunan yaitu APK SD/MI/ sederajat dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 104.15 tetapi pada tahun 2014 turun menjadi 103.35. atau turun sebesar 0.80 persen. Dari lima indikator yang mengalami kenaikan pada tahun 2014, kenaikan tertinggi pada indikator APK SMP/MTS/Paket B yang mengalami kenaikan sebesar 5 persen. Dimana capaian tahun 2013 86.13 menjadi 91.13 pada tahun 2014. Sedangkan dibanding capaian tahun 2012 semua indikator menunjukkan peningkatan capaian pada tahun 2014.

- ❖ Capaian tahun 2014 dibandingkan dengan target yang ada dalam RPJMD menunjukkan bahwa semua indikator sampai dengan akhir tahun 2014 masih mengalami kesenjangan dengan target yang ada dalam RPJMD. Kesenjangan tertinggi ada pada indikator APM SMP/MTS/Paket B dengan kesenjangan mencapai 19.87 persen. APK SMP/MTS/Paket B juga masih terjadi kesenjangan yang cukup tinggi mencapai 8.87 persen diikuti angka melanjutkan ke SMP/MTS/Paket dengan kesenjangan antara target RPJMD dengan capaian tahun 2014 mencapai 7.97 persen. Kesenjangan terendah pada indikator angka lulus SMP/MTS dengan kesenjangan antara realisasi tahun 2014 dengan target RPJMD hanya 0.65 persen. Kesenjangan yang masih tinggi pada beberapa indikator menggambarkan upaya yang harus dilakukan dalam satu tahun kedepan untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Terlebih, dalam tiga tahun terakhir persentase kenaikan dalam tiap tahunnya juga memberikan gambaran proyeksi satu tahun kedepan. Sehingga pada indikator-indikator tertentu diperlukan intervensi yang lebih untuk dapat mencapai target RPJMD yang berakhir tahun 2015. Tabel berikut menunjukkan perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan target dalam RPJMD:

INDIKATOR	Realisasi 2014	Target 2015 (RPJMD)	Kesenjangan (%)
APM SD/MI	91.7	98	6.3
APK SD/MI/Sederajat	103.35	105	1.65
APM SMP/MTs/Paket B	70.13	90	19.87
APK SMP/MTs/Paket B	91.13	100	8.87
Angka lulus SMP/MTS	99.25	99.9	0.65
Angka Melanjutkan ke SMP/MTS	91.03	99	7.97

Sumber data: Dikpora Kab. Wonosobo

- ❖ Capaian kinerja bidang pendidikan dengan sasaran strategis peningkatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada tahun 2014 mencapai 95.8 persen. Naik 2.1 persen dari capaian tahun 2013 yang realisasi kinerjanya 93.7 persen. Capaian kinerja tersebut juga sedikit lebih tinggi dari capaian kinerja 2012 yang mencapai 95.30 %. Capaian tahun 2014 tidak lepas dari pelaksanaan dan pengelolaan program bantuan operasional sekolah/BOS dan beasiswa bagi siswa miskin yang makin membaik. Kondisi tersebut cukup berpengaruh bagi upaya menekan angka putus sekolah di Kabupaten Wonosobo. Pada saat bersamaan juga berpengaruh terhadap angka partisipasi di Kabupaten Wonosobo.

Meskipun dari pengukuran indikator kinerja yang digunakan menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja namun sampai dengan tahun 2014 masih terdapat sejumlah permasalahan yang dijumpai di lapangan antara lain:

- ✚ Kecenderungan masuk SD kurang dari umur 7 tahun. Belum optimalnya perangkat pendukung/kebijakan dalam penerimaan siswa SD/MI menjadi salah satu faktor penyebab banyak siswa yang belum memasuki usia 7 tahun sudah masuk SD. Sehingga masih sering dijumpai anak yang belum cukup matang usianya dalam mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Disisi lain orang tua terkadang justru bangga ketika memasukkan anak yang masih dibawah tujuh tahun pada pendidikan SD.

Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terkait dengan kondisi tersebut antara lain meningkatkan peran penilik/pengawas serta Kepala UPTD Dinas untuk terus mensosialisasikan arti penting PAUD, metode pengajaran PAUD dan pentingnya kesiapan anak untuk masuk SD/MI sesuai dengan usia kematangan anak. Upaya tersebut dilakukan bersama dengan *stake holder* terkait agar menjadi kesadaran baru bagi masyarakat utamanya orang tua murid untuk memperhatikan kematangan usia anak.



Kesenjangan kualitas layanan pendidikan dasar di perkotaan dan perdesaan. Sampai dengan tahun 2014 kesenjangan antar kota dan desa dalam sektor pendidikan masih cukup terlihat. Kondisi tersebut selain dipengaruhi sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah juga dipengaruhi oleh aksesibilitas yang berbeda. Partisipasi orang tua siswa di perdesaan juga masih belum sebesar di daerah perkotaan. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah berupaya mendorong pelaksanaan manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan peran orang tua dan komite secara aktif dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan satuan pendidikan.

- ❖ Capaian kinerja tahun 2014 banyak dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Beasiswa Miskin dari pemerintah pusat. Salah satu tolok ukur dalam pelayanan pendidikan dasar adalah tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI dan APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Capaian APM pada jenjang SD/MI mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan APM ini berkat adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Beasiswa Miskin dari pemerintah pusat sehingga mampu menekan Angka Putus Sekolah. Dana Alokasi Khusus Pendidikan SD membantu meningkatkan akses dan daya

tampung dan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk SD tahun 2014 sebesar Rp 11.097.843.750 dialokasikan untuk mendanai rehab ruang kelas berat di 23 SD Negeri, ruang kelas baru di 14 SD Negeri, ruang perpustakaan di 10 SD yang pengerjaannya dilakukan secara swakelola oleh sekolah dengan membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S). Selain itu untuk menunjang peningkatan kualitas proses pembelajaran, dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan alat peraga pendidikan seperti alat peraga matematika, alat peraga IPA, alat peraga IPS, alat peraga pendidikan bahasa, jasorkes, seni budaya dan ketrampilan. Pengadaan buku Kurikulum 2013 tidak dapat dilaksanakan karena penyedia jasa yang mendaftar tidak ada yang memenuhi kualifikasi dan waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk dilakukan lelang ulang. Beberapa paket dari DAK Luncuran Tahun 2013 juga tidak dapat dilakukan lelang ulang karena kendala waktu yaitu Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD, Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD dan Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD. Program bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah berkontribusi terhadap jumlah guru starata 1 meningkat. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan penyelenggaraan bintek dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK SD/MI/Paket A mendekati 100 persen dapat dimaknai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan disertai sukses Program Kejar Paket A.

Capaian kinerja pendidikan menengah diukur dari indikator:

- 1) APK SMA/SMK/MA
- 2) APM SMA/SMK/MA
- 3) Angka putus Sekolah SMA/SMK/MA
- 4) Prosentase kelulusan SMA/SMK/MA

- ❖ Perbandingan antara target dan capaian dari empat indikator tersebut pada tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja dari keempat indikator pendidikan menengah tersebut mencapai 85.5 persen. Capaian tertinggi pada indikator prosentase kelulusan SMA/SMK/MA yang mencapai 101 persen dimana target tahun 2014 untuk prosentase kelulusan SMA/SMK/MA sebesar 98 persen tetapi realisasinya mencapai 99.42 persen. Sedangkan capaian terendah adalah angka putus sekolah SMA/SMK/MA dengan capaian kinerja 59 persen. Dimana target tahun 2014 angka putus sekolah SMA/SMK/MA 0.8 tetapi realisasinya sampai dengan akhir tahun 2014 masih mencapai 1.36. Secara lengkap capaian kinerja dari empat indikator pendidikan menengah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Indikator	Target 2014	Realisasi 2014	Hasil (%)
APK SMA/SMK/MA	53	51.36	97
APM SMA/SMK/MA	42	35.65	85
Angka putus sekolah SMA/SMK/MA	0.8	1.36	59
Prosentase Kelulusan SMA/SMK/MA	98	99.42	101
Capaian rata-rata			85.5

Sumber data: Dikpora Kab. Wonosobo

- ❖ Capaian kinerja pendidikan dasar sembilan tahun apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

INDIKATOR	REALISASI		
	2014	2013	2012
APK SMA/SMK/MA	51.36	47.79	45.71
APM SMA/SMK/MA	35.65	34.47	32.78
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	1.36	1.39	1.38
Prosentase Kelulusan SMA/SMK/MA	99.42	96.98	109.14

Sumber data: Dikpora Kab. Wonosobo

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dari empat indikator yang digunakan semua indikator menunjukkan capaian tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2013. Dari empat indikator yang mengalami kenaikan pada tahun 2014, kenaikan tertinggi pada indikator APK SMP/MTS/Paket B yang mengalami kenaikan sebesar 3.57 persen.

Disusul prosentase kelulusan SMA/SMK/MA yang mengalami kenaikan sebesar 2.44 persen dibanding capaian tahun 2013. Kenaikan terendah pada indikator angka putus sekolah SMA/SMK/MA yang hanya mengalami kenaikan 0.03 dibanding capaian tahun 2013.

- ❖ Capaian tahun 2014 dibandingkan dengan target yang ada dalam RPJMD menunjukkan bahwa semua indikator sampai dengan akhir tahun 2014 masih mengalami kesenjangan dengan target yang ada dalam RPJMD. Kesenjangan tertinggi ada pada indikator APK SMA/SMK/MA dengan kesenjangan mencapai 8.64 persen. APK SMA/SMK/MA juga masih terjadi kesenjangan yang cukup tinggi mencapai 16.35 persen. Angka putus sekolah SMA/SMK/MA juga menunjukkan kesenjangan yang masih cukup tinggi dimana target RPJMD 0.6 tetapi sampai dengan tahun 2014 realisasinya masih diangka 1.36. Kesenjangan terendah ada pada prosentase kelulusan SMA/SMK/MA yang mencapai 99.42 persen dan target RPJMD 100 persen sehingga kesenjangan tinggal 0.58 persen. Namun demikian untuk prosentase kelulusan 100 persen sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD juga bukan hal yang mudah. Bahkan dengan memephrhatikan kondisi di lapangan capaian 99.42 persen merupakan capaian yang sudah cukup optimal. Melihat kesenjangan yang ada anatar target ROPJMD dan realisasi sampai tahun 2014 sebageian besar indikator nampaknya akan sulit mencapai target dalam RPJMD. Hal tersebut apabila dibandingkan tren tiga taga tahun terakhir yang masih fluktuatif dan kalupaun ada peningkatan pada sebagian indikator tetapai persentase kenaikannnya masih bjauh dengan kesenjangan yang ada. Tabel berikut menunjukkan perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan target dalam RPJMD:

Indikator	Realisasi 2014	Target 2015 (RPJMD)	Kesenjangan (%)
APK SMA/SMK/MA	51.36	70	18.64
APM SMA/SMK/MA	35.65	52	16.35
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	1.36	0.6	0.76
Prosentase Kelulusan SMA/SMK/MA	99.42	100	0.58

Sumber data: Dikpora Kab. Wonosobo

❖ Dari empat indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pendidikan menengah capaian kinerja Tahun 2014 mencapai 85.5 persen naik 3.5 persen dari capaian tahun 2013. Meskipun menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya namun ketidaktercapaian target tahun 2014 perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Beberapa persoalan yang masih menjadi tantangan bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan menengah di Kabupaten Wonosobo antara lain:

- Daya tampung SMA/SMK milik pemerintah yang belum sepenuhnya bisa menampung siswa.
- Pendidikan menengah belum cukup menjadi daya tarik bagi sebagian masyarakat.
- Motivasi untuk melanjutkan di jenjang pendidikan menengah terkendala faktor motivasi dan ekonomi.
- Belum tersedianya sarana layanan uji kompetensi yang sesuai dengan permintaan/standar dunia usaha dan dunia industri yang dapat memberikan sertifikat kompetensi sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kualitas lulusan SMK
- Sarana dan prasarana yang ada di SMK belum maksimal
- Pengawas SMK yang hanya satu orang tidak cukup mampu untuk melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap jumlah SMK yang semakin hari semakin meningkat.

Meskipun sejumlah persoalan di atas sampai saat ini belum dapat tertangani secara optimal namun perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Wonosobo menunjukkan pergerakan kearah yang lebih positif. Faktor sosial budaya masyarakat yang semula menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan pendidikan, saat ini sudah lebih terbuka dan asertif terhadap program-program pendidikan. Beberapa peluang yang perlu terus dibangun menjadi sebuah kekuatan dalam pembangunan pendidikan menengah di Kabupaten Wonosobo antara lain:

- Meningkatnya kesempatan kerja di sektor formal yang mensyaratkan pendidikan formal. Meskipun dalam skala yang masih kecil namun tumbuhnya usaha yang bergerak dibidang jasa seperti jasa keuangan dan sebagainya di Kabupaten Wonosobo dalam beberapa tahun terakhir telah memberi harapan bagi mereka yang memiliki pendidikan formal, terutama untuk pendidikan menengah. Disini tantangannya adalah bagaimana menyiapkan siswa terutama yang di SMK memiliki *skill* yang memadai dengan tuntutan dunia kerja.
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan. Partisipasi masyarakat ini bisa dilihat dari tumbuhnya lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat. Terutama lembaga pendidikan yang memadukan kurikulum pendidikan umum dengan kurikulum pendidikan agama. Lembaga tersebut telah menjawab kebutuhan sebagian masyarakat yang menginginkan pendidikan formal dan pendidikan keagamaan. Sehingga pesantren yang juga menyediakan akses pada pendidikan formal kemudian banyak diminati masyarakat. Perkembangan ini merupakan sebuah peluang yang perlu dilihat pemerintah untuk lebih memberi perhatian bagi sekolah-sekolah swasta agar dapat menyelenggarakan proses pendidikan yang lebih berkualitas.
- ❖ Beberapa program yang sejak tahun 2013 Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan SMA/SMK serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendorong keberlanjutan peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Penggunaan dana tersebut ditujukan untuk peningkatan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Program Wajib Belajar Dua Belas tahun merupakan hal yang tidak terelakkan terkait dengan tuntutan akan daya saing sumber daya manusia Indonesia dalam era pasar global saat ini. Alokasi anggaran baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten relatif meningkat dari tahun ke tahun.

- ❖ DAK SMK Tahun 2014 sebesar Rp 8.357.502.600 dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan ruang kelas baru di 14 SMK, 5 SMK memperoleh alokasi rehab ruang belajar rusak berat. Untuk meningkatkan kenyamanan dalam proses pembelajaran 7 SMK mendapatkan rehab ruang belajar rusak sedang. Sedangkan SMK N 1 Sukoharjo, SMK Negeri 1 Kepil, SMK Negeri 1 Wadaslintang dan SMK Kalibawang membangun ruang praktek siswa sebagai media bagi siswa untuk mempraktekkan teori yang telah diterimanya. Untuk memperlancar pelayanan baik bagi siswa maupun masyarakat dan kenyamanan para personel, SMK 1 Wadaslintang menerima anggaran DAK untuk membangun ruang administrasi/perkantoran. Terdapat 2 (dua) paket kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu pengadaan dan distribusi buku kurikulum 2013 serta pengadaan alat praktek teknologi rekayasa. Proses pengadaan telah dilaksanakan melalui lelang sederhana. Namun tidak ada penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan waktu untuk dilakukan proses pengadaan ulang.
- ❖ Alokasi DAK SMA Tahun 2014 dialokasikan untuk hal serupa dengan DAK SMK. SMA N 1 Wonosobo mendapatkan 2 rehab ruang kelas rusak berat. SMA N 1 Sapuran mendapat rehab ruang belajar rusak sedang untuk 3 ruangan dan 2 (dua) ruang belajar di SMA N 1 Mojotengah. Selain mendapatkan rehab ruang kelas rusak berat, SMA Negeri 1 Wonosobo mendapatkan alokasi DAK untuk pembangunan ruang perpustakaan dan ruang laboratorium. Satu paket kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena proses pengadaan terkendala waktu untuk dilakukan proses lelang yaitu pengadaan buku kurikulum 2013. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menstimulasi siswa agar lebih aktif, SMA Negeri 1 Wonosobo, SMA Negeri 1 Selomerto dan SMA Negeri 1 Watumalang mendapatkan 1 paket peralatan laboratorium. Buku referensi hasil pengadaan DAK digunakan sebagai bahan pengayaan di perpustakaan di 17 SMA se Kabupaten Wonosobo.

- ❖ Ruang belajar sebagai prasarana utama proses pembelajaran sehingga 11 SMK dan 9 SMA mendapatkan alokasi pembangunan Ruang Kelas Baru untuk menambah daya tampung lulusan SMP sederajat dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. SMA/SMK yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah yang telah terakreditasi, memiliki jumlah rombongan belajar lebih banyak dibanding ketersediaan ruang kelas serta memiliki lahan, bersertifikat dan siap bangun dengan luas lahan sesuai dengan ketentuan. Seperti halnya alokasi DAK, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah juga dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan pengadaan sarana pembelajaran seperti Buku Perpustakaan SMA/SMK, Alat Multimedia, Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA/SMK, Pengadaan Alat Bengkel SMK. Alat bengkel yang didistribusikan ke 15 SMK adalah alat bengkel sesuai dengan jurusan/kompetensi yang dimiliki serta sesuai dengan Permendiknas Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK.
- ❖ SMA Negeri 1 Wonosobo dan SMA Muhammadiyah 1 Wonosobo mendapatkan alokasi untuk pengembangan mutu yang digunakan untuk peningkatan layanan pendidikan bermutu pada SMA dalam bentuk bantuan pengembangan implementasi kurikulum 2013 dan bantuan pengembangan kemitraan SMA yang dijalin dengan lembaga/satuan pendidikan di luar negeri yang berorientasi pada peningkatan mutu sekolah. SMA Negeri 1 Selomerto menyelenggarakan pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal untuk Program Pengembangan Potensi Keunggulan Lokal dengan pengembangan sirup salak dan pembuatan keripik salak.
- ❖ Guna menstimulasi siswa SMA untuk mengembangkan bakat keilmuan, bantuan fasilitasi penelitian IPA/IPS diberikan kepada SMA Negeri 1 Kertek, SMA Negeri 1 Sapuran dan SMA Negeri 1 Kaliwiro. Siswa yang berhak untuk difasilitasi adalah siswa memiliki kemampuan melaksanakan penelitian ilmiah, dan ruang lingkup penelitian mapel IPA adalah sains dengan salah satu topik masalah berkaitan dengan pangan dan gizi. Sedangkan Ruang lingkup penelitian mapel IPS adalah ilmu sosial dengan salah satu topik masalah berkaitan dengan pengembangan karakter.

- ❖ SMK dibentuk dengan tujuan untuk mencetak calon tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki keterampilan dan siap memasuki dunia usaha/dunia industri. Oleh karenanya beberapa kegiatan pendukung diselenggarakan untuk merespon tuntutan pasar tenaga kerja. Kegiatan Career Center yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Kepil dan SMK Informatika Carier Centre SMK bertujuan untuk meningkatkan layanan pendidikan bermutu pada SMK yang berwujud pendidikan kepada masyarakat, khususnya lulusan SMK dan/atau sederajat sebagai bekal memasuki dunia kerja. Fasilitas Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK diselenggarakan untuk meningkatkan daya serap lulusan pendidikan kejuruan pada dunia usaha dan industri melalui stimulan pembiayaan fasilitas bursa kerja khusus sehingga setelah lulus siswa dapat bekerja di dunia usaha/dunia industri yang kerjasamanya telah terjalin dengan sekolah.

SMK Negeri 2 Wonosobo, SMK Negeri 1 Sukoharjo dan SMK Muhammadiyah menerima bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penyelenggaraan kelas industri. Kelas industri dibentuk untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan permintaan industri melalui dukungan pembiayaan fasilitas program kelas industri SMK

Prioritas Bidang Kesehatan dan KB

Prioritas bidang kesehatan dan keluarga berencana sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2014 mencakup tiga sasaran strategis sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan
- Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB
- Penurunan laju pertumbuhan penduduk

Capaian kinerja bidang kesehatan dan keluarga berencana diukur dari capaian kinerja tiga sasaran strategis sebagai berikut:

Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat ini diukur dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase desa/ kelurahan UCI, capaian kinerja dari indikator ini tercapai 100 persen . Dengan capaian ini semua desa/kelurahan di Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2014 masuk kategori desa/kelurahan UCI.
- 2) Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas, target Tahun 2014 adalah 99.25 persen penduduk memiliki akses terhadap air minum berkualitas. Tetapi realisasinya baru mencapai 92.96 persen sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 94 persen.
- 3) Persentase penduduk memiliki jamban sehat, pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mentargetkan penduduk yang memiliki jamban sehat sebesar 75 persen. Sampai dengan akhir tahun realisasinya mencapai 46.36 persen. Sehingga capaian kinerja indikator ini baru mencapai 62 persen.
- 4) Persentase makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan, capaian kinerja indikator ini hanya mencapai 91 persen. Capaian kinerja ini diperoleh dari pengukuran terhadap target yang ditetapkan yaitu 70 % makanan minuman memenuhi syarat kesehatan, tetapi sampai dengan akhir tahun realisasinya baru 64 persen.
- 5) Persentase rumah tangga sehat, target kinerja untuk indikator ini sebesar 70 persen rumah tangga sehat. Target tersebut mampu terlampaui dengan realisasi rumah tangga sehat mencapai 70.27 persen. Sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 104 persen.

- 6) Persentase PKD aktif, untuk PKD aktif, pada Tahun 2014 target Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah 90 persen PKD aktif. Tetapi realisasinya sampai akhir Tahun 2014 PKD aktif baru mencapai 85 persen. Sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 94 persen dari target.
 - 7) Persentase tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan, Target kinerja indikator ini adalah 100 persen kebutuhan obat, alat kesehatan, serum dan reagensia untuk pelayanan kesehatan tercukupi. Realisasinya target tersebut mampu mencapai 100 persen.
 - 8) Persentase pelayanan kesehatan dasar sesuai standar, pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target 100 persen pelayanan kesehatan sesuai standar. Target tersebut mampu tercapai dengan baik sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100 persen.
 - 9) Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, target kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Tahun 2014 menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, mampu tercapai 100 persen.
 - 10) Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target 100 persen peserta jaminan kesehatan terlayani. Capaian kinerja indikator ini mencapai 100 persen.
- ❖ Capaian kinerja kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat tahun 2014 apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terlihat dalam tabel berikut:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Prosentase desa/kelurahan UCI	100	100	100
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	92.96	90.22	98.57
Persentase penduduk memiliki jamban sehat	46.36	43.01	49.46
Persentase kualitas makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	64	64	31
Persentase rumah tangga sehat	70.27	67.08	51.17
Persentase PKD aktif	85	70	40
Persentase tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	100	100	100
Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100
Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100

Sumber data: Dinas Kesehatan Kab. Wonosobo

Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terlihat adanya peningkatan hampir pada semua indikator kinerja. Peningkatan terbesar terjadi pada persentase PKD aktif. Pada tahun 2013 PKD yang aktif baru mencapai 70 persen, tetapi sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 85 persen PKD yang aktif. Terjadi peningkatan sebesar 15 persen dibanding periode yang sama tahun 2013. Sedangkan indikator yang tidak mengalami kenaikan adalah persentase kualitas makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan. Dimana sampai dengan akhir tahun 2014 angkanya masih tetap 64 persen. Untuk persentase penduduk yang memiliki jamban sehat terjadi kenaikan dibanding kondisi tahun 2013 meskipun hanya 3.36 persen.

- ❖ Capaian kinerja tahun 2014 bila dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah/RPJMD yang akan berakhir tahun 2015 menunjukkan sebagian indikator masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tabel berikut memperlihatkan kondisi sampai akhir 2014 dibandingkan target RPJMD yang akan berakhir tahun 2015;

Indikator	Realisasi 2014	Target 2015 (RPJMD)
Prosentase desa/kelurahan UCI	100	100
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	92.96	100
Persentase penduduk memiliki jamban sehat	46.36	80
Persentase kualitas makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	64	80
Persentase rumah tangga sehat	70.27	80
Persentase PKD aktif	85	100
Persentase tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan	100	100
Persentase pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	100	100
Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100
Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100

Sumber data: Dinas Kesehatan Kab. Wonosobo

Persentase penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas dalam RPJMD ditargetkan menjadi 100 persen pada tahun 2015. Sementara kondisi akhir 2014 masih 92.96 persen. Masih terjadi kesenjangan sebesar 7.04 persen. Target 100 persen ini menjadi akan sulit tercapai apabila dibandingkan dengan peningkatan dalam satu tahun terakhir yang baru 2.74 persen dalam satu tahun. Selain itu angka seratus persen juga akan sulit dicapai apabila dilihat dengan realitas yang ada di lapangan. Dimana jumlah penduduk yang mengalami perubahan/penambahan secara terus menerus. Kondisi kependudukan yang dinamis ini tentu saja akan sulit diikuti dengan intervensi program saat itu juga.

Pada indikator persentase penduduk yang memiliki jamban sehat, target dalam RPJMD sebesar 80 persen juga masih jauh dari kondisi saat ini. Dengan capaian yang baru 46.36 persen pada tahun 2014 masih menyisakan selisih mencapai 33.64 persen. Melihat kenaikan dalam satu tahun terakhir yang hanya 3.35 persen akan sangat sulit untuk mencapai target dalam RPJMD. Untuk indikator lain melihat kenaikan dalam satu tahun sebelumnya masih mungkin untuk bisa dicapai dengan intervensi program yang tepat.

- ❖ Capaian kinerja peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat apabila dibandingkan dengan standar nasional yang ada yaitu SPM beberapa sudah tercapai misalnya untuk desa/kelurahan UCI. Untuk indikator persentasi penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas capaiannya memang masih dibawah target nasional. Namun apabila indikator tersebut dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi, maka capaian kinerja Kabupaten Wonosobo diatas provinsi. Dimana capaian tingkat provinsi tahun 2014 sebesar 78 persen sedangkan capaian Kabupaten Wonosobo sebesar 92.96 persen. Sebaliknya, untuk indikator persentase penduduk memiliki jamban sehat capaian kinerja Kabupaten Wonosobo masih jauh di bawah capaian tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dimana untuk tingkat provinsi sudah mencapai 75 per sen tetapi untuk Kabupaten Wonosobo baru 46.36 persen.
- ❖ Dari capaian kinerja yang telah dipaparkan, Kabupaten Wonosobo masih menghadapi sejumlah persoalan dalam upaya meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dihadapkan pada persoalan ketersediaan akses terhadap air minum berkualitas yang masih dihadapi sebagian masyarakat. Kepemilikan jamban keluarga yang sehat di Kabuapten Wonosobo tergolong masih rendah. Disaat yang bersamaan kualitas makanan dan minuman yang sehat juga menunjukkan kondisi yang masih perlu penanganan serius. Kondisi tersebut mencerminkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat masih perlu mendapat perhatian berkelanjutan. Karena hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular maupun tidak menular. Munculnya korban akibat demam berdarah menunjukkan penanganan kebersihan lingkungan merupakan salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius. Penyediaan sarana kesehatan lingkungan perlu dibarengi dengan upaya peningkatan kesadaran dan ketrampilan dalam mengelola kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai upaya meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengelola dan mewujudkan

kebersihan dan kesehatan lingkungan. Capaian pada tahun 2014 ini dapat dikategorikan berhasil. Namun demikian capaian tersebut memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk terus meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Karena pada beberapa indikator capaian kinerjanya masih dibawah target yang telah ditetapkan. Keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi salah satu faktor yang cukup menentukan dalam pencapaian target kinerja. Seperti pada indikator persentase PKD aktif. Sampai saat ini beberapa bidan desa yang dtugaskan untuk mengelola dan mengoptimalkan PKD masih harus terbagi waktunya dengan tugas jaga di Puskesmas. Salah satu hasil evaluasi terkait keberadaan PKD adalah perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan/manajemen tenaga medis. Karena keterbatasan SDM dalam bidang kesehatan saat ini, sebagian petugas PKD masih sering diperbantukan di puskesmas. Sehingga harapan besar untuk menjadikan PKD sebagai penyedia layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat belum dapat terlaksana secara optimal. Petugas kesehatan yang ada masih fokus pada pertolongan persalinan sedangkan layanan yang lain secara umum masih sangat terbatas. Bahkan PKD masih identik dengan pelayanan persalinan. Pengetahuan masyarakat akan fungsi PKD dalam memenuhi akses pelayanan kesehatan dasar pada saat bersamaan perlu terus ditingkatkan. Terutama pemanfaatan PKD bagi masyarakat umum dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas dan perilaku hidup sehat di masyarakat. Di sisi lain sebagian PKD lain belum bisa optimal karena kerusakan bangunan akibat bencana yang menimpa sebagian wilayah Kabupaten Wonosobo. Sehingga perlu perbaikan agar dapat difungsikan.

Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB

Meningkatnya kualitas dan jangkauan KB diukur dengan menggunakan beberapa indikator kinerja dari sasaran strategis. Secara rinci capaian dari indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas dan jangkauan

layanan KB adalah persentase KB aktif, persentase drop out KB, jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB baru dan rasio penyuluh dengan desa/kelurahan. Berikut ini capaian kinerja untuk masing-masing indikator peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB di Kabupaten Wonosobo:

Indikator	Target 2014	Realisasi 2014	%
% KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR)	86.72	80.27	93
% drop out KB	7.68	19.63	40
Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Baru	29.217	25.313	87
Rasio penyuluh/petugas KB dengan desa/kelurahan	1:3	1:3.84	78
Capaian Rata-Rata			74.5

Sumber data: Badan KB Kab. Wonosobo

- ❖ Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerjanya pada tahun 2014 % KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR) dari target 86.72 persen realisasinya 80.27 persen dengan capaian kinerja 93 persen. Persentase drop out KB dari target 7.68 persen realisasinya 19.63 persen dengan capaian kinerja 40 persen. Jumlah pasangan usia subur dari target 29.313 dengan capaian kinerja 87 persen. Sedangkan rasio penyuluh dari target 1:3 realisasinya baru mencapai 1:3.84 dengan capaian kinerja 78 persen.
- ❖ Dibandingkan dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya maka akan terlihat seperti dalam tabel berikut:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
% KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR)	80.27	80.98	82.07
% drop out KB	19.63	20.64	17.3
Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Baru	25.313	25.754	25.014
Rasio penyuluh/petugas KB dengan desa/kelurahan	1:3.84	1:3.6	1:3.6

Sumber data: Badan KB Kab. Wonosobo

Dari empat indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB dibandingkan dengan capaian tahun 2013 maka terlihat tiga indikator mengalami penurunan capaiannya. Sedangkan satu indikator yaitu persentase drop out KB capaian tahun 2014 lebih baik di banding dengan capaian tahun 2013. Sehingga persentase drop out KB pada tahun 2014 lebih kecil dibanding tahun 2013.

- ❖ Sedangkan jika dibandingkan dengan target yang ada dalam dokumen RPJMD terlihat untuk semua indikator kinerja capaian sampai dengan tahun 2014 masih jauh dari target dalam RPJMD. Apabila dibandingkan capaian kinerja tiga tahun terakhir terlihat jika target dalam RPJMD terlalu jauh dengan tren capaian kinerja Kabupaten Wonosobo. Bahkan kesenjangan yang cukup lebar sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Sehingga akan cukup sulit mencapai target RPJMD sampai dengan akhir tahun 2015 karena target yang ditetapkan terlalu senjang dibandingkan dengan kemampuan daerah dalam mencapai target tersebut.

Indikator	Realisasi 2014	Target 2015 (RPJMD)
% KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR)	80.27	87.25
% drop out KB	19.63	6.88
Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Baru	25.313	29.774
Rasio penyuluh/petugas KB dengan desa/kelurahan	1:3.84	1:2

- ❖ Tingginya target capaian dalam RPJMD terkonfirmasi apabila dilakukan pembandingan dengan standar nasional yang ada. Misalnya untuk persentase KB aktif capaian kinerja Kabupaten Wonosobo cukup tinggi dengan capaian 80.27 persen dibandingkan standar nasional yang hanya 65 persen. Artinya capaian Kabupaten Wonosobo 15.27 persen lebih tinggi dibandingkan dengan standar nasional.

- ❖ Analisis atas hasil pengukuran indikator kinerja peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB tahun 2014 menunjukkan adanya fakta yang cukup menarik. Peserta KB aktif dengan capaian lebih dari 80 persen sudah sulit untuk ditingkatkan. Meskipun peserta KB baru tetap tinggi tetapi peserta KB baru tersebut hanya digunakan untuk mempertahankan persentase KB aktif. Dengan kata lain capaian 80 persen merupakan capaian yang cukup bagus. Hal itu juga diperkuat dengan standar nasional yang hanya 65 persen. Kemudian untuk persentase drop out KB apabila dibandingkan dengan peningkatan jumlah peserta KB baru maka persentase drop out KB yang masih cukup tinggi juga sebanding dengan peningkatan peserta KB baru. Kondisi di lapangan juga menunjukkan peserta drop out KB sebagian karena memang masih dalam masa produktif dan memiliki anak belum lebih dari satu. Terkait rasio penyuluh KB dengan jumlah desa/kelurahan yang belum sesuai target salah satu penyebabnya adalah penyuluh yang memasuki usia pensiun sampai saat ini belum ada pengganti. Disaat yang sama penambahan masih sulit karena keterbatasan rekrutmen pegawai yang bisa dilakukan.
- ❖ Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB pada tahun 2014 dengan melihat capaian masing-masing indikator kinerja menunjukkan terjadi penurunan capaian kinerja bila dibandingkan dengan tahun 2013. Kondisi yang cukup berbeda dalam satu tahun terakhir adalah penurunan persentase *drop out* KB mengalami penurunan dibanding tahun 2013. Hal tersebut mengindikasikan sejumlah program yang dikembangkan pada tahun 2014 mulai berpengaruh pada capaian kinerja indikator tersebut. Program-program pemberdayaan ekonomi bagi akseptor dari pantauan di lapangan menunjukkan mulai berpengaruh terhadap kemampuan akseptor dalam mengakses layanan KB secara mandiri. Program penyediaan alat kontrasepsi yang diprioritaskan pada daerah-daerah sasaran dengan tingkat *drop out* tinggi cukup berkontribusi dalam mempertahankan peserta KB aktif. Meskipun belum mampu menjangkau pada semua akseptor yang memerlukan. Beberapa

program yang pada tahun 2013 lalu cukup berkontribusi bagi capaian kinerja bidang keluarga berencana pada tahun 2014 juga masih diteruskan dengan beberapa pengembangan. Antara lain program pelayanan kontrasepsi, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas maupun program edukasi bagi PUS.

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

- ❖ Capaian kinerja sasaran strategis ini pada tahun 2014 sebesar 94.5 persen yang diukur dari capaian dua indikator kinerja yang digunakan yaitu angka penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) dan angka penurunan laju pertumbuhan penduduk. Berikut ini capaian kinerja untuk masing-masing indikator menurunnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Wonosobo:

Indikator	Target 2014	Realisasi 2014
Angka Penurunan TFR	2.10	1.78
Angka Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	0.99	1.29

Sumber data: Badan KB Kab. Wonosobo

- ❖ Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerjanya pada tahun 2014 Angka Penurunan TFR dari target 2.10 realisasinya 1.78 dengan capaian kinerja 112 persen. Angka penurunan laju pertumbuhan penduduk target tahun 2014 sebesar 0.99 sedangkan realisasinya 1.29 sehingga realisasi kinerjanya hanya 77 persen. Dari dua indikator tersebut terlihat bahwa dua indikator yang digunakan menunjukkan hasil kinerja yang cukup berbeda.
- ❖ Dibandingkan dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya maka akan terlihat seperti dalam tabel berikut:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Angka Penurunan TFR	1.78	1.87	1.99
Angka Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	1.29	0.82	0.15

Sumber data: Badan KB Kab. Wonosobo

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk angka penurunan TFR dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang cukup baik. Untuk tahun 2014 capaian kinerja indikator tersebut juga meningkat dibanding capaian tahun 2013. Sebaliknya, untuk angka penurunan laju pertumbuhan penduduk capaian kinerjanya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

- ❖ Sedangkan jika dibandingkan dengan target yang ada dalam dokumen RPJMD terlihat untuk indikator angka penurunan TFR target dalam RPJMD sudah terlewati karena sampai dengan tahun kelima (2015) target yang ditetapkan untuk angka penurunan TFR adalah 2 dan capaian tahun 2014 adalah 1.78. Untuk indikator angka penurunan laju pertumbuhan penduduk sampai dengan akhir tahun 2015 targetnya 0.99 namun realisasi tahun 2014 sebesar 1.29. Melihat capaian kinerja indikator ini nampaknya sulit target dalam RPJMD akan tercapai sampai dengan akhir 2015.

Indikator	Realisasi 2014	Target 2015 (RPJMD)
Angka Penurunan TFR	1.78	2
Angka Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	1.29	0.99

- ❖ Analisis atas hasil pengukuran sasaran menurunnya laju pertumbuhan penduduk menunjukkan penurunan pada indikator angka TFR tetapi terjadi kenaikan pada indikator angka penurunan laju pertumbuhan penduduk. Penurunan angka TFR memperlihatkan adanya kecenderungan masyarakat untuk mempunyai sedikit anak. Kesadaran untuk mengatur atau membatasi jumlah kelahiran makin meningkat. Tetapi untuk penurunan laju pertumbuhan penduduk kondisinya berbeda. Mestinya ketika angka TFR turun maka laju penurunan pertumbuhan penduduk juga akan makin kecil. Tetapi kenyataannya ternyata berbeda. Kondisi ini dimungkinkan karena faktor migrasi atau perpindahan penduduk bukan karena kelahiran di kabupaten wonosobo.

- ❖ Penurunan laju pertumbuhan penduduk merupakan isu penting bagi pembangunan daerah. Karena laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembangunan akan tidak banyak berarti apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Karena kemampuan untuk menyediakan kebutuhan seperti lapangan kerja, fasilitas kesehatan maupun fasilitas pendidikan tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada. Selain karena faktor pengembangan program pendidikan KB bagi masyarakat dan remaja khususnya, capaian tersebut merupakan kontribusi yang bersifat lintas sektoral dalam mendorong keberhasilan program KB terutama terkait isu penundaan usia pernikahan. Program-program KIE bagi masyarakat yang terus dilakukan secara berkesinambungan merupakan salah satu kunci untuk terus mempertahankan capaian angka TFR yang sudah cukup baik.

Prioritas Bidang Infrastruktur

Prioritas pembangunan bidang infrastruktur mempunyai sasaran strategis sebagai berikut:

- Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten
- Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan
- Peningkatan kapasitas layanan infrastruktur jalan desa

Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten

Sasaran strategis ini mempunyai dua indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerjanya, yaitu:

- Panjang jalan kondisi baik antara ibu kota kabupaten – kecamatan. Target kinerja untuk indikator ini pada Tahun 2014 adalah 193.36 Kilometer jalan dengan kondisi baik. Realisasinya sampai akhir Tahun 2014 panjang jalan kondisi baik antara ibu kota kabupaten – kecamatan mencapai 160.24 Kilometer. Dari realisasi tersebut capaian kinerjanya sebesar 82 persen. Terdapat kesenjangan antara target dan capaian sebesar 18 persen.

Panjang jalan kondisi baik antar ibu kota kecamatan. Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target panjang jalan kondisi baik antar ibu kota kecamatan adalah 196.76 Kilometer. Realisasinya sampai dengan akhir Tahun 2014 mencapai 161.24 Kilometer. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 82 persen. Terdapat kesenjangan antara target dan capaian sebesar 18 persen.

Tabel berikut memperlihatkan perbandingan antara target dan capaian masing-masing indikator:

Indikator	Target 2014	Realisasi 2014	Hasil (%)
Panjang jalan kondisi baik antara ibu kota kabupaten – kecamatan	193.36	160.24	82
Panjang jalan kondisi baik antar ibu kota kecamatan	196.76	161.24	82

Sumber data: DPU kab. Wonosobo

- Apabila dibandingkan antara capaian tahun 2014 dengan capaian tahun sebelumnya maka kondisinya akan terlihat seperti dalam tabel berikut

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Panjang jalan kondisi baik antara ibu kota kabupaten – kecamatan	160.24	165.41	165.25
Panjang jalan kondisi baik antar ibu kota kecamatan	161.24	131.55	130.21

Sumber data: DPU kab. Wonosobo

Panjang jalan kondisi baik antara ibu kota kabupaten – kecamatan pada tahun 2014 mengalami penurunan 5.17 Kilometer dibanding capaian tahun 2013. Begitu juga bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 5.01 Kilometer. Sedangkan untuk panjang jalan kondisi baik antar ibu kota kecamatan mengalami kenaikan dibanding capaian tahun 2013 dan tahun 2012. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 maka pada tahun 2014 mengalami kenaikan sepanjang 29.69 Kilometer.

- Dibandingkan dengan target RPJMD capaian tahun 2014 menunjukkan kesenjangan pada panjang jalan kondisi baik antara ibu kota kabupaten –

kecamatan dengan capaian tahun 2014 masih dibawah target RPJMD. Sedangkan untuk panjang jalan kondisi baik antar ibu kota kecamatan target RPJMD sudah terlampaui sejak tahun 2012. Tabel berikut memperlihatkan perbandingan tersebut:

Indikator	Realisasi 2014	Target 2015 (RPJMD)
Panjang jalan kondisi baik antara ibu kota kabupaten – kecamatan	160.24	199.76
Panjang jalan kondisi baik antar ibu kota kecamatan	161.24	117.10

Sumber data: DPU kab. Wonosobo

- Kualitas dan kuantitas jalan kabupaten dalam tiga tahun terakhir dari data menunjukkan belum adanya perkembangan yang cukup signifikan. Dengan capaian yang masih fluktuatif menunjukkan efektivitas upaya pembangunan yang telah dilakukan belum cukup optimal. Kondisi geografis Kabupaten Wonosobo dengan curah hujan yang tinggi serta tanah yang sebagian labil, menjadi salah satu penyebab kondisi jalan tidak sesuai dengan umur rencana jalan. Namun demikian kualitas pembangunan/pemeliharaan jalan nampaknya juga berpengaruh pada usia kondisi jalan. Perencanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaannya menjadi isu penting dalam upaya meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Wonosobo. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas perlu mendapat perhatian dan terobosan agar persoalan tersebut tidak selalu menjadi kendala dalam upaya peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Wonosobo. Upaya pembinaan terhadap pihak ketiga/ penyedia jasa konstruksi perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan sumber daya manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya bidang infrastruktur juga perlu diprioritaskan seiring dengan agenda pembangunan infrastruktur yang masih menjadi salah satu prioritas di Kabupaten Wonosobo. Langkah yang sudah diambil dengan memperbaiki perencanaan yang komprehensif dan penyediaan aparatur yang memadai perlu terus dioptimalkan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan

- Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja persentase jumlah jembatan kondisi baik. Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan jumlah jembatan dalam kondisi baik adalah 75.53 persen. Realisasinya sampai akhir 2014 mencapai 73.06 persen dengan capaian kinerja 98 persen.
- Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 maka terjadi peningkatan sebesar 1.75 persen dimana tahun 2013 persentase jembatan kondisi baik baru mencapai 71.29 persen dan tahun 2014 menjadi 73.06 persen.
- Target yang ditetapkan dalam RPJMD sampai dengan tahun 2015 persentase jembatan kondisi baik adalah 77.18 persen. Dengan capaian tahun 2014 sebesar 73.06 persen maka masih terdapat kesenjangan sebesar 4.15 persen. Kesenjangan tersebut diharapkan dapat dicapai dalam waktu satu tahun kedepan.
- Meskipun terjadi peningkatan capaian kinerja namun untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD diperlukan upaya yang cukup serius mengingat kondisi Kabupaten Wonosobo saat ini. Tantangan yang harus dihadapi kabupaten Wonosobo dalam meningkatkan kualitas jembatan yang perlu mendapat perhatian antara lain:
 - Kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang berbukit-bukit dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kondisi ini menjadikan potensi kerusakan jembatan cukup tinggi. Sebagaimana besar wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki daerah rawan longsor yang senantiasa mengancam kondisi jembatan yang ada. Debit air yang cukup tinggi terutama pada musim hujan dan dengan material erosi berupa lumpur dan batu yang terbawa air menjadi ancaman bagi kualitas jembatan di Kabupaten Wonosobo.
 - Kemampuan sumber daya yang sangat terbatas, terutama sumber daya keuangan menjadikan program peningkatan kualitas jembatan berjalan lambat. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih belum sebanding bahkan jauh dengan kebutuhan untuk perbaikan

maupun pemeliharaan jembatan yang tersebar di seluruh pelosok kabupaten. Sementara, dengan karakteristik wilayah pegunungan menjadikan kebutuhan anggaran untuk perbaikan maupun pemeliharaan cukup tinggi pada masing-masing titik jembatan.

- Pengawasan pelaksanaan pembangunan seringkali belum optimal ketika pelaksanaan kegiatan dalam rentang waktu yang relative pendek. Sehingga distribusi sumber daya pengawas harus benar-benar efektif agar dapat menjangkau seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Peningkatan kapasitas layanan infrastruktur jalan desa

- Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja jumlah panjang jalan desa kondisi baik. Target kinerja untuk indikator ini pada tahun 2014 adalah 43 Kilometer jalan desa dengan kondisi yang baik. Realisasinya sampai dengan akhir tahun 2014 baru mencapai 42.24 Kilometer. Sehingga capaian kinerja untuk indikator terbut baru 98 persen.
- Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terjadi penurunan yang cukup besar. Realisasi tahun 2014 dibawah capaian tahun 2013 dengan selisih capaian 10.73 Kilometer. Dimana pada tahun 2013 panjang jalan desa dengan kondisi baik sepanjang 52.97 Kilometer, pada tahun 2014 turun menjadi 42.24 Kilometer.
- Dibandingkan dengan target dalam RPJMD terdapat kesenjangan yang cukup tinggi. Dalam RPJMD ditetapkan sampai dengan tahun 2015 panjang jalan kondisi baik sepanjang 74.59 Kilometer. Sehingga capaian tahun 2014 baru mencapai 57 persen dari target dalam RPJMD. Kesenjangan yang masih cukup besar tersebut cukup sulit untuk dicapai dalam waktu satu tahun kedepan.
- Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan adalah belum adanya kejelasan kriteria jalan desa. Sehingga menyulitkan intervensi pembangunan di lapangan.

Prioritas Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

Prioritas pembangunan pertanian dan ketahanan pangan mencakup empat sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan dan hortikultura
3. Meningkatnya produksi hasil budidaya peternakan
4. Meningkatnya layanan irigasi teknis

Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama

Sasaran strategis peningkatan ketersediaan bahan pangan utama diukur dari indikator kinerja persentase ketersediaan bahan pangan utama dan tingkat skor pola harapan pangan. Capaian kinerja atas dua indikator tersebut adalah 89 persen dari target yang telah ditetapkan. Di target rata-rata untuk dua indikator tersebut sebesar 99 persen. Analisis atas capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- ❖ Persentase ketersediaan bahan pangan utama target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk Tahun 2014 adalah 100 persen. Sedangkan realisasinya hanya mencapai 86 persen. Dengan capaian tersebut terdapat kesenjangan antara target dengan realisasinya sebesar 14 persen. Tingkat skor pola harapan pangan target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk Tahun 2014 adalah sebesar 98 persen. Sedangkan realisasinya hanya 90.1 persen. Dengan capaian tersebut terdapat kesenjangan antara target dengan realisasinya sebesar 7.9 persen. Capaian kinerja dibanding target kinerja 92 persen.
- ❖ Dibandingkan dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya maka akan terlihat seperti dalam tabel berikut:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Persentase ketersediaan bahan pangan utama	86	90.43	93.64
Tingkat pola pangan harapan	90.1	87	85.5

Sumber data: kantor ketahanan Pangan Kab. Wonosobo

Dari tabel di atas terlihat bahwa tahun 2014 capaian kinerja Kabupaten Wonosobo pada dua indikator yang diukur memperlihatkan hasil yang berbeda. Pada indikator ketersediaan bahan pangan utama capaian kinerja tahun 2014 mengalami penurunan dibanding capaian dua tahun sebelumnya. Bahkan untuk indikator ini selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan yang berlanjut. Setelah menurun pada tahun 2013, penurunan juga terjadi pada tahun 2014 dengan penurunan mencapai 4.43 poin.

Sedangkan untuk indikator tingkat pola pangan harapan mengalami kenaikan yang cukup bagus. Dari 87 persen pada tahun 2013 menjadi 90.1 persen pada tahun 2014. Tingkat pola pangan harapan di Kabupaten Wonosobo dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan tiap tahunnya.

- ❖ Sedangkan jika dibandingkan dengan target yang ada dalam dokumen RPJMD terlihat untuk tingkat ketersediaan bahan pangan utama target dalam jangka menengah adalah 100 persen dan tingkat pola pangan harapan sebesar 92 persen. Sehingga untuk ketersediaan bahan pangan utama kesenjangan dengan target dalam RPJMD sampai dengan akhir tahun 2015 cukup tinggi. Untuk mencapai target tersebut dengan waktu yang tersisa dalam satu tahun harus meningkatkan capaian sebesar 14 persen sebagaimana diperlihatkan tabel berikut:

Indikator	Realisasi 2014	Target Akhir RPJMD (2015)
Prosentase ketersediaan bahan pangan utama	86	100
Tingkat pola pangan harapan	90.1	92

Sumber data: kantor ketahanan Pangan Kab. Wonosobo

Untuk tingkat pola pangan harapan antara realisasi tahun 2014 dengan target akhir dalam RPJMD kesenjangan yang ada tidak terlalu besar hanya 1.9 persen. Mengikuti tren capaian kinerja tahun sebelumnya maka target dalam RPJMD dimungkinkan dapat tercapai sampai dengan akhir tahun 2015.

- ❖ Ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Wonosobo tahun 2014 apabila dibandingkan dengan standar nasional yang ada yakni standar Pelayanan Minimal/SPM dari Kemendagri maka terdapat kesenjangan sebesar 14 persen dimana target SPM sebesar 100 persen tetapi capaian di Kabupaten Wonosobo hanya 86 persen.
- ❖ Menurunnya capaian kinerja pada indikator ketersediaan bahan pangan utama pada tahun 2014 sangat dipengaruhi oleh menurunnya produksi komoditas padi di Kabupaten Wonosobo. Dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2014. Dari data yang dihimpun oleh Kantor Ketahanan Kabupaten Wonosobo produksi padi tahun 2014 hanya 79.343 ton turun dari tahun 2013 yang mencapai 94.655 ton. Penurunan produksi padi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:
 - a) berkurangnya luas lahan tanam dari 28.361 ha pada tahun 2013 menjadi 23.620 ha pada tahun 2014. Berkurangnya luas lahan tanam ini terjadi terutama karena alih fungsi lahan menjadi pemukiman atau tempat usaha non pertanian dan perubahan komoditas tanaman padi ke tanaman palawija seperti cabe dan kacang-kacangan. Sampai dengan saat ini alih fungsi lahan masih terjadi di beberapa daerah lumbung padi di Kabupaten Wonosobo seperti Kertek, Selomerto dan Leksono. Berkurangnya luas lahan tanam juga dipengaruhi oleh menurunnya jumlah rumah tangga petani saat ini. Meskipun belum ada catatan resmi terkait jumlah rumah tangga petani tetapi menurut pantauan lapangan dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo terlihat secara kuantitatif jumlah rumah tangga petani terus mengalami penurunan. Rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian dan sulitnya mencari buruh tani menyebabkan kemampuan mengolah lahan pertanian menurun.
 - b) menurunnya produktivitas tanaman padi dari 52 kwintal per hektar pada tahun 2013 menjadi 48 kwintal per hektar pada tahun 2014. Selain karena faktor menurunnya tingkat kesuburan tanah,

produktivitas padi juga sangat dipengaruhi oleh tehnik pertanian yang diterapkan petani dan keterbatasan ketersediaan bibit unggul di tingkat petani.

- ❖ Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo terkait dengan ketersediaan bahan pangan utama baik melalui kantor ketahanan pangan maupun melalui dinas teknis yang terkait antara lain: penambahan pasokan pangan terutama gula, terigu dan kedelai pada momen-momen tertentu seperti hari raya ketika kebutuhan masyarakat meningkat tajam. Secara bertahap upaya perbaikan tehnik pertanian juga terus dilakukan dan dibarengi dengan penyediaan bibit unggul serta pupuk yang cukup. Meskipun harus diakui kemampuan untuk melakukan upaya tersebut barangkali masih cukup jauh dengan yang dibutuhkan.
- ❖ Program yang cukup berkontribusi dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Wonosobo antara lain program peningkatan infrastruktur pertanian seperti perbaikan dan pembangunan irigasi teknis baik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum maupun oleh Dinas pertanian Tanaman Pangan melalui pembangunan jaringan irigasi desa maupun jaringan irigasi usaha tani. Selain itu program mekanisasi pertanian juga terus didorong untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian.

Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan dan hortikultura

Hasil pengukuran capaian kinerja atas sasaran strategis ini diperoleh dari pengukuran atas empat indikator kinerja yaitu Produksi tanaman pangan yang mencapai, Produktivitas tanaman pangan, Produksi tanaman hortikultura, Produktivitas tanaman hortikultura.

Produksi tanaman pangan

- Capaian indikator produksi tanaman pangan diperoleh dari pengukuran atas realisasi target kinerja produksi tanaman pangan tahun 2014 seperti dalam tabel berikut:

Indikator	Target 2014	Realisasi 2014	Hasil (%)
Produksi tanaman pangan:			
Padi	149.771	154.870	103.4
Jagung	115.101	97.420	84.6
Ketela pohon	193.389	256.686	132.7
Ubi jalar	18.785	20.164	107.3

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Wonosobo

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Wonosobo secara kumulatif untuk empat jenis tanaman pangan padi, jagung, ketela pohon dan ubi jalar realisasi kinerjanya mencapai 107 persen. Dari tabel dapat dilihat tiga komoditi realisasi tahun 2014 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja paling tinggi pada komoditi ketela pohon dengan capaian kinerja mencapai 132.7 persen. Hanya komoditi jagung yang tidak memenuhi target dengan capaian kinerja 84.6 persen saja.

- Dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya untuk komoditas tanaman pangan di Kabupaten Wonosobo terlihat seperti dalam tabel berikut:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Produksi tanaman pangan:			
Padi	154.870	149.771	162.980
Jagung	97.420	115.101	117.748
Ketela pohon	256.686	193.389	185.009
Ubi jalar	20.164	18.785	17.522

Sumber data: kantor ketahanan Pangan Kab. Wonosobo

Produksi tanaman pangan tahun 2014 dari empat komoditi yang dibandingkan diketahui produksi mengalami kenaikan pada tiga komoditi yaitu padi, ketela pohon dan ubi jalar. Sedangkan untuk produksi jagung mengalami penurunan. Bahkan untuk jagung dalam dua tahun terakhir telah mengalami penurunan yang cukup tinggi. Tahun 2012 tercatat produksi jagung masih mencapai 117.748 ton dan ditahun 2014 hanya 97.420 ton. Untuk padi meskipun mengalami penurunan pada tahun 2013 mengalami kenaikan lagi pada tahun 2014 meskipun produksinya masih dibawah produksi tahun 2012. Komoditi ketela pohon dan ubi jalar mengalami kenaikan secara kontinyu sejak tahun 2012 sampai tahun 2014.

- Capaian produksi tanaman pangan tahun 2014 dibandingkan dengan target produksi yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD seperti dalam tabel berikut:

Indikator	Realisasi 2014	Target 2015 (RPJMD)
Produksi tanaman pangan:		
Padi	154.870	184.450
Jagung	97.420	166.892
Ketela pohon	256.686	221.200
Ubi jalar	20.164	24.102

Sumber data: kantor ketahanan Pangan Kab. Wonosobo

Produksi tanaman pangan tahun 2014 dibandingkan dengan target dalam RPJMD kondisinya beragam. Produksi padi masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi. Meskipun dalam kurun satu tahun terakhir mengalami kenaikan tetapi untuk mencapai target dalam RPJMD masih agak sulit karena produksi padi masih dihadapkan pada sejumlah persoalan yang ada dilapangan. Kenaikan dalam satu tahun juga belum cukup signifikan untuk diproyeksikan dengan target yang ada dalam RPJMD. Untuk produksi jagung kondisinya makin jauh dengan target dalam RPJMD. Penurunan yang berturut-turut dua tahun terakhir makin menjauhkan antara target RPJMD dengan realisasi produksinya. Posisi yang cukup bagus ada pada komoditi ketela pohon. Dengan kenaikan yang terjadi dalam dua tahun terakhir target RPJMD sudah terlewati oleh produksi tahun 2014. Sementara, untuk ubi jalar masih ada peluang target RPJMD dapat tercapai dalam satu tahun kedepan. Meskipun hal tersebut bukan hal yang mudah melihat kesenjangan antara realisasi tahun 2014 dengan target dalam RPJMD karena dalam dua tahun terakhir kenaikan produksinya memang belum cukup signifikan.

Produksi tanaman pangan yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2013 secara linear juga terkait dengan produktivitas masing-masing komoditi. Pada komoditas yang mengalami kenaikan produksi tingkat produktivitasnya juga mengalami kenaikan. Sebaliknya komoditas yang mengalami penurunan produksi produktivitasnya juga mengalami

penurunan. Tabel berikut memperlihatkan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Wonosobo dalam tiga tahun terakhir:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Produktivitas tanaman pangan (ton/ha)			
Padi	5.1	5.1	5.5
Jagung	3.9	4.0	3.7
Ketela pohon	37.30	31.28	26.7
Ubi jalar	20.18	19.60	19.55

Sumber data: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Wonosobo

Dari data produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Wonosobo terlihat produktivitas tanaman pangan berkorelasi langsung dengan produksinya. Perbedaan hanya terjadi pada komoditas padi untuk tahun 2014, dimana produktivitasnya relative tetap tetapi terjadi peningkatan produksi. Hal tersebut dimungkinkan karena faktor curah hujan tahun 2014 yang memungkinkan sebagian lahan tadah hujan dapat ditanami karena ketersediaan air yang cukup. Juga pembangunan jaringan irigasi teknis di beberapa tempat yang biasanya hanya bisa melakukan sekali tanam dengan irigasi yang ada dapat menanam lebih dari sekali.

Menurunnya capaian produksi dan produktivitas komoditas jagung dari hasil pantauan lapangan disebabkan oleh masih belum optimalnya penggunaan bibit unggul oleh petani. Sebagian petani masih kurang berminat menggunakan bibit jenis hibrida yang tingkat produktivitasnya cukup tinggi. Selain minat petani yang masih perlu ditingkat juga karena faktor ketersediaan bibit unggul yang belum terdistribusi dengan baik sehingga di beberapa daerah masih sulit diakses oleh petani.

Pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah melakukan beberapa langkah strategis guna peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan utamanya komoditas padi. Antara lain dengan mengembangkan program pembangunan jaringan irigasi usaha tani maupun peningkatan jalan usaha tani dan program peningkatan produksi, produktivitas serta mutu tanaman pangan. Sampai dengan tahun 2014 jalan usaha tani yang telah berhasil

dibangun mencapai 28.000 meter meningkat cukup signifikan dibanding capaian tahun 2013 yang baru mencapai 15.000 meter. Pembangunan ini kedepan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas distribusi sarana maupun bahan-pertanian dan juga hasil-hasil pertanian di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Wonosobo.

- Beberapa program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja antara lain program peningkatan sarana pertanian dengan kegiatan perbaikan jaringan irigasi desa maupun jaringan irigasi usaha tani. Juga dikembangkan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu padi dan jagung, optimasi lahan yang disertai dengan pengawalan program melalui penyuluh pertanian yang ada di tingkat kecamatan. Hal tersebut juga dilakukan sebagai antisipasi untuk meningkatkan produksi padi ditengah makin berkurangnya lahan persawahan akibat alih fungsi lahan.

Meningkatnya populasi dan produksi hasil budidaya peternakan-perikanan

Peningkatan produksi hasil budidaya peternakan-perikanan mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut:

Meningkatnya produksi ikan budidaya dengan indikator kinerja jumlah produksi perikanan budidaya.

- Target jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2014 yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebanyak 5.652 ton. Realisasi sampai akhir tahun 2014 mencapai 7.834 ton dengan realisasi tersebut capaian kinerjanya mencapai 139 persen.
- Dibandingkan dengan jumlah produksi tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 jumlah produksi perikanan budidaya hanya 6.895 ton. Sehingga dalam satu tahun terjadi peningkatan sebanyak 939 ton. Dengan kata lain dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi peningkatan hingga 18 persen. Hasil capaian tahun 2014 juga lebih tinggi dibanding capaian tahun 2012. Dimana capaian tahun 2012

mencapai 6.894 ton. Berikut capaian tahun 2014 dibanding capaian dua tahun sebelumnya:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Jumlah produksi perikanan budidaya	7.834	6.897	6.895

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Wonosobo

- Dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo untuk produksi perikanan budidaya sampai dengan tahun 2014 telah terlampaui. Target produksi perikanan budidaya dalam RPJMD sebanyak 6.050 ton sampai dengan akhir tahun 2015.

Meningkatnya produksi benih unggul

Peningkatan produksi benih unggul diukur menggunakan indikator jumlah produksi benih unggul oleh Balai Benih Ikan Kabupaten Wonosobo. Untuk indikator tersebut capaian tahun 2014 sebagai berikut:

- Target produksi benih unggul oleh Balai Benih Ikan Kabupaten Wonosobo sebanyak 2.990 kilogram sampai dengan akhir tahun 2014. Namun reliasasinya hanya mencapai 770 kilogram. Dengan hasil tersebut capaian kinerja untuk indikator produksi benih unggul hanya tercapai 26 persen jauh dari target yang telah ditetapkan.
- Dibandingkan dengan capaian tahun 2013, maka capaian tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup tajam. Tahun 2013 capaian kinerja untuk indikator produksi benih unggul mencapai 2.190 kilogram. Penurunan yang terjadi mencapai 1.420 kilogram.
- Salah satu kendala dalam upaya peningkatan produksi bibit unggul adalah keterbatasan SDM yang mempunyai ketrampilan dan pengetahuan yang memadai dalam pembibitan. Tenaga fungsional khusus untuk pembibitan masih sangat terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terhadap bibit unggul makin meningkat. Selain itu juga keterbatasan anggaran untuk pengembangan balai benih yang sudah ada. Sehingga pada tahun 2014 balai benih hanya memproduksi benih berdasarkan permintaan sebagai

cara untuk mensiasati keterbatasan anggaran. Harus diakui pengelolaan BBI sampai saat ini masih belum optimal. BBI hanya memproduksi benih ikan sejumlah pesanan yang masuk. Itu pun sebagaian adalah pesanan dari internal instansi untuk pemenuhan pengadaan bibit yang diperuntukkan bagi kelompok-kelompok binaan. BBI belum dikelola sebagai sebuah institusi professional yang memproduksi bibit unggul untuk dipasarkan kepada masyarakat guna mendukung ketersediaan bibit unggul bagi peternak. Padahal kebutuhan bibit unggul dikalangan peternak sebenarnya relative tinggi. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi bibit unggul adalah dengan melakukan penambahan induk serta peningkatan sarana prasarana pembenihan. Namun itu sebenarnya juga belum cukup apabila produksi hanya dilakukan secara berkala.

Meningkatnya populasi ternak dan hasil produksi peternakan

Sasaran ini diukur dengan dua indikator kinerja yaitu populasi ternak dan hasil produk ternak. Pengukuran atas dua indikator tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- Untuk populasi ternak target kinerja tahun 2014 belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja mencapai 89 persen. Sedangkan untuk produk ternak, capaian kinerjanya mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 125.7 persen. Dengan capaian tersebut sasaran peningkatan populasi ternak dan hasil produksi ternak mencapai 107.3 persen. Tabel berikut memperlihatkan capaian tahun 2014:

Indikator	Target 2014	Realisasi 2014	Hasil (%)
Populasi Ternak:			
Sapi	33.941	22.172	65
Kambing	154.120	151.816	99
Domba	93.115	94.261	101
Kerbau	3.936	1.352	34
Ayam buras	726.094	944.153	130
Ayam petelur	84.475	45.898	54
Sapi perah	1.077	1.038	96
Kelinci	32.770	34.466	105
Entog	46.496	64.212	138

Puyuh	192.526	131.077	68
Produk ternak:			
Daging (kg)	6.297.677	9.696.000	154
Telur (kg)	2.239,89	909.000	41
Susu (kg)	966.487	1.763.000	182

Sumber data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Wonosobo

Capaian kinerja tertinggi pada populasi entog yang capaian kinerjanya mencapai 138 persen. Diikuti oleh populasi ayam buras dengan capaian kinerja mencapai 130 persen, populasi kelinci capaian kinerjanya 105 persen dan populasi domba dengan capaian kinerja 101 persen. Capaian kinerja terendah pada populasi kerbau yang hanya mencapai 34 persen diikuti populasi ayam petelur dengan capaian kinerja 54 persen.

- Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dengan membandingkan capaian dari dua belas indikator yang diukur pada tahun 2014 menunjukkan hasil yang beragam. Tujuh indikator menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibanding capaian tahun 2013. Sedangkan lima indikator lainnya capaian kinerja tahun 2014 lebih rendah dibanding capaian tahun 2013. Tabel berikut menunjukkan perbandingan capaian tahun 2014 dengan capaian dua tahun sebelumnya:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Populasi Ternak:			
Sapi	22.172	25.411	27.975
Kambing	151.816	154.120	143.493
Domba	94.261	93.049	89.865
Kerbau	1.352	2.073	2.163
Ayam buras	944.153	726.094	683.764
Ayam petelur	45.898	38.323	21.486
Sapi perah	1.038	1.416	1.841
Kelinci	34.466	26.426	24.949
Entog	64.212	42.326	42.977
Produk ternak:			
Daging (kg)	9.696.000	4.847,660	6.297,67
Telur (kg)	909.000	1.431,020	2.239,89
Susu (kg)	1.763.000	909.652	966.487

Tujuh indikator yang capainnya meningkat dibanding dengan capaian tahun 2013 adalah populasi domba, ayam buras, kelinci, ayam petelur,

entog, produksi daging dan produksi susu. Kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada produksi daging yang produksi tahun 2013 sebanyak 4.847.660 naik mencapai 9.696.000 pada tahun 2014. Produksi susu juga mengalami peningkatan cukup tajam dari 909.652 pada tahun 2013 menjadi 1.763.000 pada tahun 2014.

Lima indikator yang menunjukkan capaian yang lebih rendah dibanding capaian tahun sebelumnya adalah sapi, kambing, kerbau, sapi perah dan produksi telur. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada populasi kerbau yang pada tahun 2013 2.037 pada tahun 2014 tinggal 1.352. Penurunan populasi kerbau ini bila dilihat dari data yang ada diketahui penurunannya terjadi dalam dua tahun terakhir.

- Pengukuran kinerja tahun 2014 menunjukkan perbedaan tren dikalangan peternak. Penurunan populasi ternak besar seperti sapi, kerbau atau kambing dalam kurun waktu satu tahun. Sebaliknya untuk ternak kecil seperti unggas dan kelinci menunjukkan peningkatan. Khusus untuk penurunan populasi kerbau yang terjadi selama dua tahun terakhir masih banyak dipengaruhi oleh pergeseran pola pertanian. Dimana fungsi kerbau dalam pengolahan lahan pertanian makin menurun karena makin meningkatnya mekanisasi pertanian. Menurunnya fungsi kerbau dalam usaha pertanian menjadikan minat masyarakat untuk memelihara kerbau, berangsur-angsur turun. Apalagi harga kerbau juga relative lebih mahal dibanding ternak lainnya seperti sapi misalnya untuk ukuran yang sama. Sementara, untuk konsumsi daging kerbau juga sangat rendah. Meningkatnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi daging entok nampaknya mulai berpengaruh terhadap minat untuk membudidayakan entog. Hal tersebut terlihat dari populasi entog yang mengalami kenaikan cukup tajam dibanding populasi dua tahun sebelumnya. Untuk ternak kecil seperti entog juga mengalami penurunan yang cukup terlihat.

Peningkatan populasi pada sebagian ternak kecil juga dipengaruhi oleh faktor resiko. Dimana ternak kecil resiko dan modal yang dibutuhkan juga relatif jauh lebih kecil. Hal ini karena sampai dengan tahun 2014 peternak di wilayah Kabupaten Wonosobo umumnya adalah peternak kecil dengan sumber daya yang masih terbatas. Tren konsumsi daging entog ternyata belum sebanding dengan kemampuan budidaya ternak ini.

Pada indikator produk ternak terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Sebagian besar petani/peternak di Kabupaten Wonosobo memang masih mengandalkan pakan ternak yang bersumber dari alam, terutama rumput. Sehingga ketika persediaan pakan alami ini meningkat juga berpengaruh pada produk ternak yang dihasilkan baik susu maupun daging. Sepanjang tahun 2014 kondisi curah hujan di Kabuapten Wonosobo cukup tinggi sehingga ketersediaan pakan alami juga lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk telur menurut pantauan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, penurunan produksi telur salah satu faktor penyebabnya adalah berkurangnya populasi ayam petelur.

- Beberapa program yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian target tahun 2014 antara lain: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Penguatan Kelembagaan, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program-program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yaitu: Kegiatan Peningkatan Pelayanan UPTD RPH, Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak pada Masyarakat, Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi Perah di Kabupaten Wonosobo, Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi, Kegiatan Pengembangan Ternak Itik Unggul, Kegiatan Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Sapi Potong, Kegiatan Pengembangan Ternak Kambing Jawa Randu, Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Ternak Perah,

Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong, Kegiatan Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Produk Susu, Kegiatan Pelatihan Keterampilan Peternakan Sapi Perah Kegiatan Pengembangan dan Pakan Ternak Sapi Simental, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Petugas Peternakan di Lapangan, Kegiatan Pengembangan Budidaya Domba, Kegiatan Pengembangan Ternak Jenis Unggul, Pengembangan dan Pelestarian Ternak Plasma, Kegiatan Pengembangan Ternak Kambing.

Meningkatnya layanan Irigasi teknis

Capaian kinerja sasaran strategis peningkatan layanan irigasi teknis diukur dari dua indikator kinerja yaitu persentase daerah irigasi dalam kondisi baik serta rasio panjang saluran irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani. Hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja sasaran ini sebagai berikut:

- Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebesar 80 persen untuk tahun 2014. Sedangkan realisasinya 72.75 persen sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 91 dari target yang ditetapkan. Rasio panjang saluran irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani target yang ditetapkan adalah 20.93 persen dengan realisasi 20.63 persen. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 98 persen. Dari dua indikator yang digunakan capaian kinerja rata-rata untuk sasaran meningkatnya layanan irigasi teknis mencapai 94.5 persen pada tahun 2014.
- Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 maka terjadi peningkatan capaian pada tahun 2014 seperti terlihat dalam tabel berikut:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik	72.75	70.8	71.05
Rasio panjang saluran irigasi dengan daerah irigasi yang terlayani	20.63	19.60	18.63

Sumber data: DPU Kab. Wonosobo

Untuk persentase daerah irigasi dalam kondisi baik meningkat 1.95 persen dibanding capaian tahun 2013. Sedangkan rasio panjang saluran irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani meningkat 1.03 persen pada tahun 2014.

- Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi. Dalam RPJMD ditetapkan sampai dengan tahun 2015 persentase daerah irigasi dalam kondisi baik mencapai 90 persen. Masih terdapat kesenjangan sebesar 17.25 persen antara realisasi tahun 2014 dengan target tahun 2015/RPJMD. Melihat realisasi dalam tiga tahun terakhir dimana persentase kenaikan relative sedikit, bahkan pada tahun 2013 juga terjadi penurunan dibanding realisasi tahun 2012 tampaknya akan cukup sulit target dalam RPJMD akan tercapai dalam waktu satu tahun.
- Upaya pemeliharaan saluran irigasi teknis juga tidak hanya dengan tindakan sipil teknis tetapi juga dengan perawatan yang melibatkan partisipasi masyarakat petani selaku pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir ada kecenderungan keterlibatan petani pengguna dalam pemeliharaan saluran cenderung menurun. Sehingga perlu koordinasi antar SKPD terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan agar kelompok pengguna air/ petani bisa menjadi sumber daya dalam pemeliharaan dan perawatan saluran irigasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kinerja peningkatan layanan irigasi teknis dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:
 - Kualitas perawatan dan pembangunan irigasi teknis di Wilayah Kabupaten Wonosobo. Kegiatan perawatan maupaun pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya irigasi teknis, di beberapa titik menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh kualitas pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga. Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat timingnya seperti ketika pekerjaan dilakukan ketika sudah mulai memasuki musim penghujan.

Pengawasan yang belum optimal dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

- Terjadinya tanah longsor atau banjir pada daerah irigasi teknis. Kejadian tersebut cukup berpengaruh karena frekuensinya yang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2014 di wilayah Kabupaten Wonosobo terjadi banjir dan tanah longsor yang mengenai irigasi teknis. Sehingga terjadi kerusakan yang berpengaruh dan menurunkan tingkat kefungsi saluran irigasi yang ada.

Prioritas Bidang Konsolidasi Reformasi Birokrasi

Prioritas ini mencakup empat sasaran strategis yaitu:

Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Sasaran startegis peningkatan efektivitas, efisensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan dua indikator kinerja yang terdiri dari opini hasil pemeriksaan BPK dan persentase rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti. Capaian kinerja atas dua indikator tersebut adalah 96.5 persen dari target yang telah ditetapkan. Analisis atas capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- ❖ Opini hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 targetnya adalah wajar dengan pengecualian. Realisasinya sampai dengan akhir 2014 opini hasil pemeriksaan yang diterima Kabupaten Wonosobo masih wajar dengan pengecualian sehingga capaian kinerjanya 100 persen. Untuk indikator rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti target tahun 2014 adalah 97 persen. Sampai dengan data terakhir yang diberikan BPK yaitu per Juni 2014 realisasinya baru mencapai 90.17 persen. Sedangkan sampai dengan 31 Desember 2014 data belum diberikan oleh BPK.
- ❖ Dibandingkan dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya maka akan terlihat seperti dalam tabel berikut:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Opini hasil pemeriksaan BPK	100	100	100
Persentase rasio temuan yang ditindaklanjuti	90.1	98.97	98.16

Sumber data: BPS Kab. Wonosobo

Dari tabel di atas terlihat bahwa tahun 2014 capaian kinerja Kabupaten Wonosobo pada dua indikator yang diukur memperlihatkan perbedaan capaian kinerjanya. Pada indikator opini hasil pemeriksaan BPK capaian dua tahun sebelumnya mencapai 100 persen begitu juga dengan tahun 2014. Untuk indikator persentase rasio temuan yang ditindaklanjuti penurunan antara capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebesar 7.90 persen.

- ❖ Sedangkan jika dibandingkan dengan target yang ada dalam dokumen RPJMD untuk opini hasil pemeriksaan BPK target dalam dokumen jangka menengah daerah adalah wajar tanpa pengecualian pada tahun 2015. Melihat capaian selama tiga tahun terakhir dimana opini hasil pemeriksaan BPK masih dalam posisi wajar dengan pengecualian dan untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian sesungguhnya dimungkinkan bisa dicapai pada tahun 2015. Persoalan yang ada saat ini adalah pengelolaan dan pencatatan asset. Hal itu bisa diperbaiki dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Untuk persentase rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti target dalam RPJMD adalah 100 persen pada tahun 2015. Melihat capaian tahun 2014 tampaknya agar target dapat dicapai perlu kerja keras bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Meskipun hasil akhir tahun 2014 masih menunggu dari data BPK tetapi melihat tren tahun-tahun sebelumnya angka 100 persen untuk indikator rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti nampaknya juga tidak mudah. Berikut realisasi tahun 2014 dibandingkan dengan target RPJMD:

Indikator	Realisasi 2014	Target Akhir RPJMD (2015)
Opini hasil pemeriksaan BPK	100/WDP	100/WTP
Persentase rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti	90.17	100

- ❖ Opini hasil pemeriksaan BPK yang masih wajar dengan pengecualian dipengaruhi oleh masih adanya kelemahan dalam pencatatan aset oleh Kabupaten Wonosobo. Pencatatan aset yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masih berbeda dengan pencatatan aset di SKPD. Sebagian SKPD belum menyusun catatan aset sesuai hasil rekonsiliasi yang sudah dilakukan oleh DPPKAD. Sehingga ketika dilakukan cross cek oleh BPK catatan aset sebagian SKPD berbeda dengan data aset setelah rekonsiliasi. Kelemahan pengelolaan administrasi aset disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:
- a) masih rendahnya kesadaran dari SKPD akan pentingnya pelaporan dan inventarisasi barang setelah proses pengadaan.
 - b) Kurang efektifnya fungsi pengguna barang dalam melakukan pengawasan terhadap pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah.
 - c) Jabatan pengurus barang dianggap tugas tambahan sehingga SDM tidak disiapkan secara khusus untuk menguasai masalah inventarisasi barang.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah untuk memperbaiki pencatatan aset antara lain dengan membuat edaran ke SKPD agar segera melakukan perbaikan pencatatan aset sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan. SKPD juga agar segera melaporkan pengadaan barang tidak harus menunggu akhir tahun. Selain itu juga menghimbau kepada pimpinan SKPD agar pengurus barang dipegang oleh staf khusus terutama untuk SKPD dengan aset yang cukup besar. Namun demikian, upaya tersebut belum cukup

berpengaruh dalam proses pencataan dan pengelolaan aset di SKPD.

Program yang sudah mulai dirintis oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pengelolaan aset adalah peningkatan tata kelola aset melalui aplikasi SIMBADA/ Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah. Melalui penerapan aplikasi SIMBADA diharapkan kedepan pencatatan aset akan lebih akurat. Dimana hasil rekonsiliasi aset akan langsung masuk dalam system aplikasi sehingga tidak ada perbedaan data yang ada di SKPD dengan data pada DPPKAD.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Sasaran startegis peningkatan pendapatan asli daerah/PAD diukur dengan indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk tahun 2014 capaian kinerja peningkatan pendapatan asli daerah sebagai berikut:

- ❖ Target kinerja untuk persentase kenaikan pendapatan asli daerah untuk tahun 2014 adalah 20 persen. Realisasinya sampai akhir tahun 2014 kenaikannya mencapai 50.6 persen. Sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 253 persen dari target yang telah ditetapkan.
- ❖ Dibandingkan dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya maka akan terlihat seperti dalam tabel berikut:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Persentase kenaikan pendapatan asli daerah	50.6	24.8	22.9

Sumber data: DPPKAD Kab. Wonosobo

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2013 persentase kenaikan PAD 24.8 persen. Tahun 20114 mencapai 50.6 persen atau terjadi kenaikan 25.8 persen dibanding capaian tahun 2013. Persentase kenaikan tahun 2014 dibanding tahun 2013 juga jauh lebih tinggi dibanding capaian pada tahun 2013 dan tahun 2012. Pada tahun 2013

kenaikan dari tahun sebelumnya hanya 1.9 persen. Hasil tersebut menunjukkan capaian tahun 2014 memang cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

- ❖ Sedangkan jika dibandingkan dengan target yang ada dalam dokumen RPJMD terlihat untuk persentase peningkatan PAD tahun 2014 sudah jauh melampaui target dalam RPJMD. Dimana target dalam RPJMD hanya 25 persen pada tahun 2015. Berikut realisasi tahun 2014 dibandingkan dengan target RPJMD:

Indikator	Realisasi 2014	Target Akhir RPJMD (2015)
Persentase kenaikan PAD	50.6	25

Peningkatan PAD tahun 2014 yang realisasinya jauh melebihi target dipengaruhi pendapatan bunga deposito, pajak bumi bangunan, pajak air tanah dan pajak penerangan jalan umum. Pada sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sejak tahun 2013 ini dikelola langsung oleh daerah pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk pajak penerangan jalan melalui kordinasi yang makin intensif dengan PLN UPJ Purwokerto juga menghasilkan kenaikan pajak yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 kabupaten Wonosobo juga mengembangkan metode self assesment pada wajib pajak. Metode ini juga berrpengaruh pada kenaikan pendapatan pajak daerah.

- ❖ Program yang dilaksanakan pada tahun 2014 untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dengan beberapa kegiatan antara lain:
 - a) Intensifikasi pemungutan dan pendataan pajak daerah.
 - b) Optimalisasi PAD
 - c) Penyusunan data zona nilai tanah
 - d) Perangsang lunas awal PBB
 - e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendapatan asli daerah
 - f) Pelaksanaan kegiatan MP TPTGR

Meningkatnya kualitas sistem perencanaan

Capaian sasaran strategis diukur dari capaian empat indikator kinerja yang meliputi persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, persentase kesesuaian program/kegiatan RKPD dengan APBD, persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD, persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD. Dari pengukuran terhadap indikator tersebut capaian tahun 2014 sebagai berikut:

- Untuk persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah target kinerja dapat tercapai dengan capaian kinerja 100 persen. Indikator persentase kesesuaian program/kegiatan RKPD dengan APBD dari target 100 persen realisasinya hanya tercapai 63.59 persen. Untuk persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD target 100 persen pada tahun 2014 realisasinya 78.45. Untuk indikator persentase kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD mampu tercapai 100 persen. Tabel berikut memperlihatkan capaian tahun 2014:

Indikator	Target 2014	Realisasi 2014	Hasil (%)
persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100	100	100
persentase kesesuaian program/kegiatan RKPD dengan APBD	100	63.59	63.59
persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD	100	78.45	78.45
persentase kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD	100	100	100
Capaian rata-rata			85.51

Sumber data: Bappeda Kab. Wonosobo

Dari table dapat dilihat capaian terendah dari empat indikator yang digunakan untuk melakukan capaian kinerja sasaran, capaian terendah pada indikator persentase kesesuaian program/kegiatan RKPD dengan APBD. Dengan target 100 persen realisasi sampai akhir 2014 baru tercapai 63.59 persen. Terdapat kesenjangan dengan target sebesar 36.41 persen.

- ❖ Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 kondisinya cukup variatif. Dua indikator capaian tahun 2014 sama dengan capaian tahun 2013. Satu indikator mengalami kenaikan yaitu persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD mengalami kenaikan capaian dari 68.5 persen pada tahun 2013 menjadi 78.45 pada tahun 2014. mengalami kenaikan hampir sepuluh persen. Sedangkan satu indikator mengalami penurunan yaitu persentase kesesuaian program/kegiatan RKPD dengan APBD dari 83.69 pada tahun 2013 menjadi 63.59 pada tahun 2014. Atau turun sekitar 20.10 persen.

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100	100	100
persentase kesesuaian program/kegiatan RKPD dengan APBD	63.59	83.69	85.12
persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD	78.45	68.5	82.91
persentase kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD	100	100	100

Sumber data: Bappeda Kab. Wonosobo

- ❖ Diabandingkan dengan target dalam RPJMD menunjukkan dua indikator sudah memenuhi target yaitu terkait ketepatan waktu dan kesesuaian proses. Sedangkan dua indikator masih menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi. Melihat capaian dalam tiga tahun terakhir untuk persentase kesesuaian program/kegiatan RKPD dengan APBD yang trennya mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir akan cukup sulit untuk mencapai target RPJMD dalam satu tahun kedepan. Begitu juga dengan persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD dimana capaiannya masih fluktuatif. Meskipun tahun 2014 mengalami kenaikan tetapi dibandingkan dengan capaian tahun 2012 masih dibawah capaian tahun 2012. Table berikut memperlihatkan perbandingan realisasi tahun 2014 dengan target RPJMD:

Indikator	Realisasi 2014	Target RPJMD	Kesenjan gan (%)
persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100	100	0
persentase kesesuaian program/kegiatan RKPD dengan APBD	63.59	100	36.41
persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD	78.45	100	21.55
persentase kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD	100	100	0

- ❖ Hasil pengukuran kinerja bidang perencanaan pada tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja 85.51 persen. Capaian tersebut merupakan rata-rata kinerja atas empat indikator yang digunakan. Terkait dengan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu indikator kualitas sistem perencanaan pembangunan, pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui Bappeda selaku pengampu urusan perencanaan mampu mencapai 100% target yang telah ditetapkan. Hal tersebut merujuk pada Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana musrenbang untuk Tahun 2014 lalu terlaksana sebelum bulan Maret dan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2014 telah ditetapkan melalui peraturan bupati belum melewati batas yang telah ditentukan.

Untuk kesesuaian program/kegiatan RKPD dengan APBD dan kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD yang masih menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi antara target dan capaiannya pada Tahun 2014 menunjukkan belum optimalnya kualitas perencanaan di Kabupaten Wonosobo. Salah satu factor yang cukup mempengaruhi kualitas perencanaan di Kabuapten Wonosobo adalah proses KUA PPAS dan pembahasan RAPBD sudah diluar kendali instansi perencana sehingga seringkali terjadi perubahan rancangan dalam pembahasannya. Hal itu juga

dipengaruhi belum optimalnya fungsi TAPD dalam pembahasan APBD. Capaian kesesuaian program juga dipengaruhi program dari pusat yang tidak ada dalam RPJMD, termasuk di dalamnya penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan spm.

Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil

Capaian kinerja sasaran strategis peningkatan kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil diukur dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase kepemilikan KTP berbasis NIK
 - 2) Persentase kepemilikan KK
 - 3) Persentase kepemilikan akta kelahiran
 - 4) Persentase anak lahir yang membuat akte kelahiran
- ❖ Dari empat indikator kinerja tersebut capaian kinerja untuk sasaran strategis peningkatan kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2014 sebesar 89.75 persen. Secara rinci capaian masing-masing indikator terlihat dalam tabel berikut ini:

Indikator	Target 2014	Realisasi 2014	%
% kepemilikan KTP berbasis NIK	100	85.68	86
% kepemilikan KK	100	97.31	97
% kepemilikan Akta kelahiran	95	71.76	75
% Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran	95	96.42	101

Sumber: Disdukcapil Kab. Wonosobo

Apabila dibandingkan antara target dan realisasinya pada tahun 2014 dari empat indikator tiga indikator menunjukkan hasil kinerja dibawah target sedangkan satu indikator yakni indikator anak lahir yang membuat akte kelahiran capaian kinerja melampaui target. Sedangkan capaian terendah pada indikator kepemilikan akte kelahiran yang capaiannya hanya 75 persen dari target. Kondisi tersebut cukup menarik artinya secara kumulatif

kepemilikan akte masih dibawah target tetapi kepemilikan akte bagi anak yang baru lahir melampaui target.

- ❖ Capaian kinerja tahun 2014 apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terlihat seperti dalam tabel berikut:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
% kepemilikan KTP berbasis NIK	85.68	98.08	99.53
% kepemilikan KK	97.31	99.71	98.66
% kepemilikan Akta kelahiran	71.76	66.02	62.04
% Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran	96.42	96.65	99.39

Sumber: Disdukcapil Kab. Wonosobo

- ❖ Dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya terlihat dari empat indikator tiga indikator mengalami penurunan capaian pada tahun 2014. Satu indikator mengalami kenaikan yaitu persentase kepemilikan akte kelahiran yang mengalami kenaikan sebesar 5.74 persen dibanding capaian tahun 2013. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 terjadi kenaikan 9.72 persen. Untuk indikator persentase anak lahir yang membuat akte kelahiran mengalami sedikit penurunan yaitu 0.23 persen. Penurunan ini jauh lebih kecil dibanding penurunan tahun 2013 dimana terjadi penurunan 2.74 persen dibanding capaian tahun 2012. Penurunan terbesar pada indikator persentase kepemilikan KTP berbasis NIK dimana capaian tahun 2013 sebesar 98.08 persen turun menjadi 85.68 persen pada tahun 2014. Atau terjadi penurunan sebesar 12.40 persen.
- ❖ Capaian sasaran strategis peningkatan kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2014 dibandingkan dengan target dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

Indikator	Realisasi 2014	TARGET RPJMD
% kepemilikan KTP berbasis NIK	85.68	100
% kepemilikan KK	97.31	100
% kepemilikan Akta kelahiran	71.76	100
% Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran	96.42	100

Dibandingkan antara capaian tahun 2014 dengan target dalam RPJMD masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi hampir pada semua

indikator. Mencermati capaian dalam tiga tahun terakhir dimana sampai dengan tahun 2014 capaian kinerja masing-masing indikator masih cukup fluktuatif tampak bahkan beberapa indikator capainnya cenderung turun maka akan menjadi tidak mudah untuk bisa mancapai target dalam RPJMD. Satu indikator yang mengalami kenaikan yaitu persentase kepemilikan akte kelahiran realisasinya sampai dengan tahun 2014 masih jauh dengan target apabila dibandingkan dengan tingkat kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Bahkan untuk indikator tersebut bisa jadi terlalu tinggi dengan capain 100 persen ini bila dibandingkan dengan target nasional/SPM yang hanya 90 persen sampai dengan tahun 2020.

- Capaian kinerja peningkatan kualitas administrasi kependudukan tahun 2014 menunjukkan adanya penurunan di beberapa indikator kinerja dengan capaian kinerja yang mencapai 89.75 persen. Indikator yang capaiannya cukup rendah adalah persentase kepemilikan KTP berbasis NIK yang sampai dengan akhir 2014 baru mencapai 85.68 persen. Sementara targetnya adalah 100 persen. Ketidaktercapaian target indikator tersebut terjadi karena masih cukup banyak wajib KTP yang belum melakukan perekaman e-KTP. Meskipun pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan pendataan dan perekaman e-KTP secara serempak dengan jemput bola di tingkat desa namun belum semua wajib KTP dapat melakukan perekaman sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dari wajib KTP yang belum melakukan perekaman tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar. Pertama wajib KTP belum melakukan perekaman karena tidak berdomisili di alamat pada waktu perekaman. Mereka sebagian ada yang bekerja di luar kota maupun sedang sekolah/kuliah di luar daerah. Kedua sebagian adalah penduduk dengan usia yang sudah cukup tua dan merasa dokumen kependudukan tidak terlalu penting lagi. Terkait dengan kondisi tersebut sebenarnya sudah dilakukan jadwal perekaman ulang dan sosialisasi jadwal perekaman melalui perangkat desa dan RT/RW. Perekaman e-KTP kesekolah bagi wajib KTP pemula juga sudah dilakukan tetapi sampai dengan akhir 2014 capaian kinerjanya masih jauh dari target

yang telah ditetapkan. Terkait kepemilikan KTP berbasis NIK mengalami penurunan capaian dibanding tahun 2012, hal ini terjadi karena masih banyak penduduk yang belum melakukan rekam E-KTP. Hal itu terjadi karena sebagian masih tinggal di luar kota maupun sebagian yang lain masa berlaku KTP lama sudah habis namun belum diperpanjang lagi, terutama untuk penduduk yang lanjut usia. Masih harus dilakukan upaya serius untuk membangun kesadaran masyarakat arti penting kepemilikan dokumen kependudukan. Sehingga tidak mengurus dokumen kependudukan pada saat akan menggunakan saja. Sosialisasi terkait kelengkapan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan prosedur pelayanannya. Sehingga kesalahan dalam pembuatan dokumen kependudukan dapat diminimalisir. Untuk persentase kepemilikan KK capaian kinerjanya mencapai 97 persen sedikit dibawah target yang telah ditetapkan. Kondisi di lapangan saat ini menunjukkan masih ada penduduk yang sudah menikah tetapi belum memiliki KK sendiri. Sebagian masih mengikuti KK orang tuanya. Kebiasaan ini terjadi di berbagai daerah di Kabupaten Wonosobo, terutama di daerah pedesaan.

- ❖ Beberapa program yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut antara lain:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan termasuk di dalamnya adalah jemput bola untuk pelayanan administrasi kependudukan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa.
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana penerbitan dokumen kependudukan hal ini dilakukan untuk mepercepat kemampuan pelayanan dan mengurangi kerusakan proses pencetakan dokumen kependudukan.
 - 3) Pengembangan sumber daya manusia terkait pelayanan administrasi kependudukan untuk memberikan dukungan bagi pelayanan yang lebih baik. Di beberapa kecamatan sampai saat ini operator administrasi kependudukan rata-rata masih terbatas sehingga

seringkali menghambat pelayanan. Pelayanan masih mengandalkan satu atau dua pegawai yang mampu mengoperasikan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan.

Prioritas Peningkatan Iklim dan Investasi Usaha

Sasaran strategis dari prioritas ini adalah peningkatan investasi daerah. Capaian kinerja dari sasaran strategis tersebut diukur dari dua indikator kinerja yaitu jumlah investasi yang masuk ke Kabupaten Wonosobo dan nilai investasi yang diinvestasikan di Kabupaten Wonosobo. Pengukuran atas nilai dan jenis investasi yang ada di daerah masih ada kerancuan terkait cara obyek penghitungannya. Sehingga dalam laporan ini kemudian penghitungan investasi didasarkan pada penerbitan ijin usaha yang dikeluarkan dan perhitungan asset masing-masing usaha yang mengajukan ijin dan telah dikeluarkan ijin usahanya. Berdasarkan cara penghitungan tersebut untuk sasaran meningkatnya iklim dan investasi usaha di Kabupaten Wonosobo yang diukur dengan indikator jumlah dan nilai investasi, pada tahun 2014 hasilnya sebagai berikut:

- Tahun 2014 jumlah investasi di Kabupaten Wonosobo yang mengajukan ijin dan telah dikeluarkan ijin usahanya mencapai 767 investasi dengan beragam jenis usaha yang dilakukan. Sehingga untuk indikator ini pada tahun 2014 realisasi target mencapai 100 persen. Sedangkan untuk nilai investasi, tahun 2014 target nilai investasinya yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 145.6 milyar. Dari data yang dilaporkan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal sampai dengan akhir tahun 2014 nilai investasi yang masuk selama satu tahun mencapai 220.45 milyar rupiah. Dengan realisasi tersebut capaian kinerja untuk indikator tersebut mencapai 151 persen. Sehingga capaian kinerja rata-rata untuk dua indikator tersebut mencapai 125.5 persen.
- Dibandingkan dengan capaian kinerja dua tahun terakhir maka capaian tahun 2014 terlihat seperti pada tabel berikut:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Jumlah investasi	767	503	695
Nilai investasi (milyar rupiah)	220.45	833.58	195.79

Sumber: bagian Perekonomian dan Penanaman Modal

Dari tabel dapat dilihat bahwa dibandingkan tahun 2013 jumlah investasi tahun 2014 mengalami kenaikan mencapai 52 persen dibanding capaian tahun 2013. Dibandingkan capaian tahun 2012 tahun 2014 juga mengalami kenaikan meskipun persentasenya lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan dari sisi nilai investasi capaian tahun 2014 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Penurunan tersebut cukup besar mencapai 663.13 milyar. Kondisi tersebut menjelaskan bila tahun 2014 apabila tahun 2014 nilai investasi pada unit-unit usaha relatif kecil dibanding tahun 2013.

- Dibandingkan dengan target dalam RPJMD apabila target untuk dua indikator kinerja yang digunakan sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Baik jumlah maupun nilai investasinya. Dalam RPJMD target tahun 2015 untuk nilai investasi hanya 150.6 milyar rupiah. Jauh dibawah realisasi tahun 2014.
- Dari pengukuran indikator jumlah dan nilai investasi apabila keduanya diperbandingkan maka diperoleh rata-rata nilai investasi sekitar 287 juta untuk masing-masing investasi. Dengan proporsi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2014 investasi di Kabupaten Wonosobo di dominasi oleh usaha kecil dan usaha mikro. Hal tersebut juga menunjukkan berkembangnya usaha mikro kecil di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan untuk usaha skala menengah maupun skala besar belum menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan.
- Program-program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2014 untuk mendorong peningkatan jumlah dan nilai investasi di Kabupaten Wonosobo antara lain:

- Program peningkatan pelayanan perijinan. Melihat proporsi pelaku usaha di Kabuapten Wonosobo yang sebagian besar adalah usaha kecil dan mikro maka faktor perijinan merupakan persoalan yang cukup mempengaruhi jumlah dan nilai investasi yang masuk ke daerah. Persyaratan administrasi maupun lama proses pengurusan perijinan menjadi salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan oleh calon investor. Sejak tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah membentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang sebelumnya Dinas Pelayanan Terpadu. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang lebih baik bagi calon investor. Sehingga dengan kemudahan tersebut mampu mendorong kenaikan jumlah maupun nilai investasi yang masuk ke wilayah Kabupaten Wonosobo.
- Program peningkatan promosi investasi. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal telah melakukan beberapa kegiatan promosi sebagai sarana untuk memperkenalkan potensi investasi di Kabupaten Wonosobo. Selain mengikuti kegiatan promosi di tingkat regional maupun nasional juga dilakukan promosi produk unggulan dan potensi daerah dan pembuatan sarana prasarana serta materi promosi. Melalui kegiatan tersebut calon investor dan stake holder makin mengetahui potensi yang ada di Wonosobo.

Meskipun jumlah investasi mengalami kenaikan namun dengan kenyataan menurunnya nilai investasi dalam jumlah yang relatif besar maka ada beberapa hal yang perlu terus mendapat perhatian kedepan:

- Regulasi bidang penanaman modal dan perijinan yang masih perlu diperbaharui, termasuk penyederhanaan proses perijinan.
- Perlu didesain penanaman modal dan perijinan dalam satu pintu.
- Peningkatan daya saing daerah dibidang investasi.
- Peningkatan kualitas dan ketrampilan bagi tenaga kerja lokal.
- Peningkatan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan investasi di Wonosobo.

- Peningkatan koordinasi antar SKPD juga perlu diperkuat terkait peningkatan potensi dan daya saing daerah agar SKPD mempunyai peran dan kontribusi yang lebih jelas bagi arah pengembangan investasi di Wonosobo. Identifikasi potensi investasi dari masing-masing SKPD sesuai dengan bidang tugasnya perlu disinergikan sehingga Wonosobo memiliki data potensi investasi yang lebih komprehensif.

Prioritas Bidang Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas ini mempunyai dua sasaran strategis yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik dan meningkatnya penggunaan energi alternatif. Capaian kinerja tahun 2014 untuk dua sasaran tersebut sebagai berikut:

- Dibandingkan antara target dan realisasinya maka capaian kinerja bidang pengembangan energi dan sumber daya mineral diperlihatkan dalam tabel berikut:

Indikator	Target 2014	Realisasi 2014	Hasil (%)
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik:			
- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.	100	100	100
- Rasio penyediaan listrik terhadap kebutuhan	109	109	100
Meningkatnya penggunaan energi alternatif:			
- Jumlah ijin usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif yang digunakan	3	1	33

Sumber data: DPU Kab. Wonosobo

Realisasi target kinerja bidang energi dan sumber daya mineral tahun 2014 berdasarkan capaian kinerja masing indikator kinerja mencapai 66.5 persen. Diperoleh dari sasaran peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrik dengan capaian kinerja 100 persen dan sasaran peningkatan penggunaan energi alternatif sebesar 33 persen. Dengan capaian tersebut dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya masih

terdapat kesenjangan sebesar 33.5 persen.

- Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 realisasi kinerja tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan pada indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Peningkatan tahun 2014 cukup besar mencapai 31 persen dimana tahun 2013 realisasi rumah tangga yang menggunakan listrik baru 69 persen.

Indikator	Target 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik:			
- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.	100	69	71
- Rasio penyediaan listrik terhadap kebutuhan	109	109	100
Meningkatnya penggunaan energi alternatif:			
- Jumlah ijin usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif yang digunakan	1	1	2

Sumber data: DPU Kab. Wonosobo

- Dibandingkan dengan target dalam RPJMD dari tiga indikator kinerja menunjukkan dua indikator telah memenuhi target RPJMD. Sedangkan satu indikator yaitu jumlah ijin usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif yang digunakan masih jauh dari target. Kesenjangan antara target RPJMD dengan realisasi kinerja tahun 2014 masih 75 persen. Melihat capaian tahun 2014 tersebut dan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya terlihat akan sulit target dalam RPJMD bisa tercapai di tahun 2015. Berikut perbandingan realisasi tahun 2014 dibandingkan dengan target dalam RPJMD:

Indikator	Realisasi 2014	Target 2013	Kesenjangan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik:			
- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.	100	100	0
	109	109	0

- Rasio penyediaan listrik terhadap kebutuhan			
Meningkatnya penggunaan energi alternatif: - Jumlah ijin usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif yang digunakan	1	4	3

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

- Dalam upaya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pekerjaan Umum mengembangkan program listrik masuk desa. Program ini dilakukan melalui kerjasama dengan PLN Distribusi Jateng dan DIY dalam penyediaan jaringan listrik di pedesaan. Penyediaan jaringan listrik ke pedesaan juga menjadi salah satu prioritas di tahun 2014. Terkait pengajuan ijin penggunaan energi alternatif Untuk Kabupaten Wonosobo energi alternatif yang cukup potensial adalah mikro hidro. Sebagai daerah pegunungan dengan aliran sungai yang cukup deras di hampir sepanjang wilayah Kabupaten Wonosobo, pemanfaatan potensi untuk energi mikro hidro sesungguhnya cukup bagus. Namun perkembangan terakhir belum seperti yang diharapkan karena pengalaman di lapangan sampai saat ini pengembangan mikro hidro masih belum cukup ekonomis. Biaya produksi untuk listrik yang dihasilkan mikro hidro belum efisien bila dibandingkan dengan nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan oleh mikro hidro. Dalam satu tahun terakhir juga belum terlihat perkembangan dalam proses peningkatan penggunaan energi alternatif sehingga capaian kinerjanya pun masih rendah.

Prioritas Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Prioritas bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana mencakup tiga sasaran strategis yaitu berkurangnya lahan kritis, meningkatnya kualitas dan kelas air, berkurangnya resiko bencana. Capaian kinerja tahun 2014 yang diukur dari capaian ketiga sasaran tersebut mencapai...persen dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berkurangnya lahan kritis

- Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sasaran adalah persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas total hutan dan lahan kritis. Target kinerja untuk indikator tersebut pada tahun 2014 adalah 9.53 persen luas hutan dan lahan kritis direhabilitasi. Realisasinya sampai akhir tahun 2014 luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi mencapai 12.20 persen. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 128 persen.

Indikator	Target 2014	Realisasi	Hasil (%)
Persentase luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas total hutan lahan kritis	9.53	12.20	128

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonosobo

- Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 maka terlihat adanya penurunan capaian pada tahun 2014. Dimana pada tahun 2013 Persentase luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas total hutan lahan kritis mencapai 24.48 persen. Mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu 14.95 persen. Tabel berikut memperlihatkan perbandingan capaian tahun 2014 dengan capaian dua tahun sebelumnya:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Persentase luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas total hutan lahan kritis	9.53	24.48	28.16

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonosobo

Dari tabel dapat dilihat dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan dalam tiap tahunnya. Bahkan untuk tahun 2014 ini capaiannya hanya 39 persen dari capaian tahun 2013. Atau terjadi penurunan kinerja hingga 61 persen pada tahun 2014 dibanding kinerja tahun 2013.

- Dibandingkan dengan target dalam RPJMD dapat dilihat, target RPJMD sudah terlampaui. Karena dalam RPJMD, sampai dengan akhir 2015 target persentase luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas total hutan lahan kritis ditargetkan sebesar 5 persen. Bila dicermati antara target RPJMD dengan realisasi kinerjanya terdapat kesenjangan yang cukup tinggi. Target dalam RPJMD jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja dalam tiga tahun terakhir.
- Capaian kinerja tahun 2014 untuk sasaran berkurangnya lahan kritis mampu memenuhi target yang telah ditetapkan meskipun terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut tentu saja perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabuapten Wonosobo. Salah satu penyebab menurunnya capaian kinerja karena dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan realisasi anggaran APBN yang dialokasikan ke Wonosobo. Namun hal itu bukan satu-satunya factor yang menyebabkan terjadinya penurunan capaian kinerja. Faktor sumber daya manusia juga tentu berpengaruh terhadap capaian tersebut. Pengelolaan sumber daya bidang kehutanan perlu terus dioptimalkan. Partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan dan penyelamatan lingkungan perlu terus ditingkatkan. Kondisi obyektif Kabupaten Wonosobo yang rawan bencana perlu menjadi kewaspadaan bersama agar masyarakat lebih memperhatikan keselamatan lingkungan dan daya dukung lingkungan bagi kehidupan masyarakat. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemulihan dan penyelamatan lingkungan juga dipengaruhi oleh perkembangan hutan rakyat sebagai salah satu sektor ekonomi yang berpeluang untuk dikembangkan. Dalam konteks ini ekonomi yang berbasis pada lingkungan menjadi salah satu alternatif yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat. Sampai dengan tahun 2014 pemanfaatan hutan sebagai pengembangan ekonomi berbasis pelestarian lingkungan belum banyak mengalami perkembangan. Diperlukan terobosan agar upaya tersebut tidak mengalami kemandegan/stagnasi. Sehingga kedepan masyarakat bisa menjadi pelaku utama dalam upaya pemulihan dan penyelamatan lingkungan.

- Program kegiatan yang dikembangkan dalam rangka pemulihan dan penyelamatan lingkungan antara lain: Konservasi DAS hulu, Pengembangan Wanatani dan Rehabilitasi hutan dan lahan dengan bangunan sipil teknis (*gully plug, dam pengendali, sumur resapan*) . Selain program tersebut pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga mengembangkan program pelestarian plasma nutfah flora dan fauna dengan mengembangkan peran serta masyarakat terutama perangkat desa dalam upaya melindungi satwa dan flora liar dimasing-masing wilayahnya. Program tersebut perlu dikawal untuk memastikan ada tindak lanjut yang berkesinambungan dalam tahun-tahun mendatang.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas air

- Capaian kinerja peningkatan kualitas dan kuantitas air diukur dengan menggunakan tiga indikator kinerja yang meliputi: kualitas/kelas air, persentase kelestarian sumber air dan persentase peningkatan debit sumber air. Dari hasil pengukuran atas tiga indikator tersebut capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas air mencapai 71.3 persen sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Hasil (%)
Kualitas/kelas air	1	1	100
Persentase kelestarian sumber air	70	66	94
Persentase peningkatan debit sumber air	6	1.2	20
Capaian rata-rata			71.3

Sumber: Badan lingkungan Hidup Kab. Wonosobo

Dari ketiga indikator yang diukur capaian terendah pada persentase peningkatan debit sumber air yang hanya mencapai 20 persen dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk kualitas kelas air capaian kinerja tercapai 100 persen. Persentase kelestarian sumber air realisasi kinerjanya sedikit dibawah target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 94 persen.

- Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka akan terlihat pada tahun 2014 ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Kualitas/kelas air	1	1	1
Persentase kelestarian sumber air	66	62	63
Persentase peningkatan debit sumber air	1.2	1.4	2

Sumber: Badan lingkungan Hidup Kab. Wonosobo

Pada persentase kelestarian sumber air terjadi peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 4 persen. Sedangkan untuk persentase peningkatan debit sumber air mengalami penurunan sebesar 0.2 persen dibanding capaian tahun 2013. Bahkan untuk indikator ini penurunan terjadi dalam tiga tahun secara berturut-berturut. Pada indikator kualitas/kelas air capaian dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tidak ada perubahan capaian.

- Untuk kualitas kelas air target yang ditetapkan adalah kualitas kelas air 1. Tetapi sampai dengan akhir Tahun 2014 belum dilakukan pengukuran ulang terhadap kualitas air di Kabupaten Wonosobo. Hal ini disebabkan Kabupaten Wonosobo sampai saat ini belum memiliki tenaga fungsional khusus yang mampu membaca dan melakukan analisis sampel air. Kedua, keterbatasan anggaran untuk penelitian karena untuk uji kualitas air dengan sampel di beberapa titik membutuhkan dana yang cukup besar. Pengukuran kualitas air di Kabupaten Wonosobo terakhir dilakukan tahun 2010 oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Itu pun pengukuran baru dilakukan untuk DAS Sungai Serayu. Sehingga sampai Tahun 2014 belum bisa dilakukan pengukuran kinerja untuk indikator ini.
- Upaya pelestarian sumber air merupakan sebuah proses yang tidak singkat sehingga hasilnya belum bisa diukur dalam jangka pendek. Di tengah capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, Kabupaten Wonosobo sebenarnya terus berupaya untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap persoalan lingkungan. Saat ini upaya konservasi untuk

wilayah kritis juga terus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Sebagai daerah dengan curah hujan cukup tinggi ketersediaan air bersih memang belum begitu menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini berpengaruh pada perilaku masyarakat yang masih kurang memperhatikan kelestarian sumber air. Kondisi ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menggerakkan masyarakat agar lebih peduli pada kelestarian sumber air. Selain itu, lahan pertanian yang tersebar di wilayah-wilayah tangkapan menjadikan kemampuan tangkapan air menurun ketika perluasan dan intensifikasi pertanian kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam satu tahun terakhir terjadi perkembangan yang cukup menarik dimana seiring pelaksanaan program pamsimas dan peningkatan akses air bersih secara mandiri, perhatian masyarakat pada sumber-sumber air di sekitarnya mulai meningkat. Perkembangan tersebut perlu ditangkap pemerintah untuk mendorong masyarakat lebih berperan dalam upaya pelestarian sumber-sumber air. Bukan sebaliknya justru membiarkan terjadinya eksploitasi pada sumber-sumber air oleh masyarakat. Pemerintah juga perlu memetakan potensi sumber air yang ada untuk memberikan jaminan bahwa da distribusi pemanfaatan sumber air yang adil dengan tetap menjaga kelestariannya.

Berkurangnya resiko bencana

Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari dua indikator kinerja yaitu persentase jumlah meninggal akibat bencana dan persentase tertanganinya dampak bencana. Capaian kinerja untuk dua indikator tersebut pada tahun 2014 sebagai berikut:

- Tahun 2014, target persentase jumlah meninggal akibat bencana adalah 1 persen. Realisasinya sampai akhir tahun 2014 mencapai 1.2 persen sehingga capaian kinerja indikator ini hanya terealisasi 82.6 persen. Sedangkan capaian kinerja indikator persentase tertanganinya dampak bencana mencapai 100 persen. Sehingga capaian kinerja untuk sasaran berkurangnya resiko bencana pada tahun 2014 sebesar 91.3 persen.

- Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 maka capaian kinerja 2014 mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena turunnya capaian kinerja pada indikator persentase meninggal akibat bencana dari 0.9 persen pada tahun 2013 menjadi 1.2 persen pada tahun 2014. Tabel berikut memperlihatkan capaian sasaran berkurangnya resiko bencana tiga tahun terakhir:

Indikator	Realisasi		
	2014	2013	2012
Persentase jumlah meninggal akibat bencana	1.2	0.9	0.1
Persentase tertanganinya dampak bencana	100	100	100

Sumber data: Kantor Kesbangpolinmas kab. Wonosobo

- Dibandingkan dengan target dalam RPJMD masih terjadi kesenjangan antara capaian tahun 2014 pada indikator persentase jumlah meninggal akibat bencana. Kesenjangan antara capaian tahun 2014 dengan target RPJMD masih 20 persen. Namun melihat capaian dalam tiga tahun terakhir target RPJMD masih mungkin dicapai dalam satu tahun kedepan. Sedangkan untuk persentase tertanganinya dampak bencana target dalam RPJMD sudah tercapai dengan realisasi tahun 2014. Berikut capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan target RPJMD/2015:

Indikator	Realisasi 2014	Target RPJMD	Kenjangan (%)
Persentase jumlah meninggal akibat bencana	1.2	1	20
Persentase tertanganinya dampak bencana	100	100	0

- Meskipun capaian kinerja untuk Tahun 2014 cukup bagus namun untuk meningkatkan kualitas pengurangan resiko bencana perlu terus didorong untuk mencapai hasil yang optimal. Terkait penanganan dampak bencana harus diakui bahwa penanganan yang diberikan kepada korban bencana harus terus dilakukan perbaikan. Sehingga korban bencana tidak hanya

mendapatkan penanganan yang bersifat sesaat tetapi juga penanganan pasca bencana yang terintegrasi.

Secara geografis Kabupaten Wonosobo termasuk daerah yang rawan bencana, terutama banjir dan tanah longsor. Dari catatan kejadian bencana sepanjang Tahun 2014, bencana tanah longsor paling sering terjadi. Dari 201 kejadian bencana di Kabupaten Wonosobo, 126 kejadian bencana adalah bencana tanah longsor. Selain tanah longsor kejadian kebakaran juga cukup menonjol, sepanjang tahun 2014 tercatat terjadi 61 kejadian kebakaran.

Meskipun masih banyak tantangan dalam penanganan bencana di Kabupaten Wonosobo, namun dari pengukuran indikator kinerjanya menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak di lapangan. Keterlibatan masyarakat sekitar dan kelompok-kelompok masyarakat yang secara aktif memberikan bantuan kepada korban bencana. Peran aktif dari Tim SAR baik dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Peran Pemerintah Provinsi Jateng maupun pemerintah pusat dalam penanganan pasca bencana. Peran media yang mempercepat akses informasi bencana bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang konsen pada penanganan bencana.

Kondisi obyektif yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan bencana di Kabupaten antara lain: Luasnya daerah rawan bencana. Masih terbatasnya sarana prasarana untuk penanggulangan bencana, baik sarana komunikasi, transportasi maupun sarana prasarana untuk penanganan korban bencana. Masih terbatasnya jumlah personil terlatih dalam penanganan bencana. Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana antar SKPD dan stake holder lain karena kelembagaan penanggulangan bencana masih bersifat *ad hoc*.

Prioritas Kesepuluh: Kawasan Tertinggal, Terbelakang, Perbatasan dan Kumuh

Prioritas ini mempunyai dua sasaran strategis yaitu optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah dan meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam untuk penataan lingkungan yang sehat. Hasil pengukuran kinerja dari dua sasaran strategis tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- Capaian kinerja prioritas ini tahun 2014 dibandingkan dengan target yang ditetapkan realisasinya mencapai 128.5 persen yang diperoleh dari pengukuran indikator kinerja berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Hasil (%)
Optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah: - Persentase penegasan batas kabupaten	100	100	100
Meningkatnya pemanfaatan SDA untuk penataan lingkungan yang sehat: - Persentase desa yang memiliki fasilitas air bersih	100	100	100
- Area pemukiman kumuh yang tertangani	100	157	157
- Jumlah rumah layak huni yang diperbaiki	3.000	5.223	174
Capaian kinerja rata-rata			121.8

Optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah dengan indikator kinerja persentase penegasan batas kabupaten. Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target penegasan batas kabupaten sebesar 100 persen atau seluruh batas kabupaten menjadi target kinerja Tahun 2014. Realisasi atas target tersebut sesuai hasil pengukuran mencapai 100 persen. Sedangkan untuk sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam untuk penataan lingkungan mencapai 144 persen yang diperoleh dari pengukuran tiga indikator yang digunakan. Capaian kinerja untuk indikator persentase desa yang memiliki fasilitas air

bersih mencapai seratus persen. Artinya, dari 236 desa yang ada di Wonosobo saat ini semuanya telah memiliki fasilitas air bersih. Untuk indikator area pemukiman kumuh yang tertangani, target Tahun 2014 adalah 100 area pemukiman kumuh. Dari hasil pengukuran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan area pemukiman kumuh yang tertangani mencapai 157 area. Dengan realisasi tersebut capaian kinerja untuk indikator tersebut mencapai 157 persen. Tahun 2014 pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan 3.000 rumah tidak layak huni dapat diperbaiki. Capaiannya sampai dengan akhir tahun 2014 jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki mencapai 5.223 unit rumah. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 174 persen.

- Dibandingkan dengan dengan capaian tahun 2013 maka pada tahun 2014 terjadi peningkatan pada indikator area pemukiman kumuh yang ditangani dan jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Indikator	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah:			
- Persentase penegasan batas kabupaten	100	100	100
Meningkatnya pemanfaatan SDA untuk penataan lingkungan yang sehat:			
- Persentase desa yang memiliki fasilitas air bersih	100	100	64
- Area pemukiman kumuh yang tertangani	157	121	80
- Jumlah rumahtidak layak huni yang diperbaiki	5.223	3.386	2.534

Kenaikan jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding capaian tahun 2013. Dari 3.386 pada tahun 2013 menjadi 5.223 pada tahun 2014 atau terjadi

kenaikan sebanyak 1.837 unit rumah yang diperbaiki. Jumlah area pemukiman kumuh yang ditangani juga mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu ada kenaikan 36 area yang ditangani pada tahun 2014 dibanding tahun 2013. Untuk penegasan batas dan persentase desa yang memiliki fasilitas air bersih capaian tahun 2013 dapat dipertahankan pada tahun 2014.

- ❖ Pada indikator penegasan batas kabupaten, mMeskipun capaian sasaran telah mencapai seratus persen namun Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo masih akan meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan daerah. Mengingat dari evaluasi yang telah dilakukan masih ada beberapa titik yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar pengelolaan perbatasan ini lebih optimal dan lebih baik. Persoalan daerah perbatasan selain persoalan batas yang kedepan perlu lebih diperhatikan adalah peningkatan aksesibilitas daerah perbatasan. Apakah akses terhadap pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan maupun akses untuk peningkatan perekonomian daerah perbatasan. Persentase desa yang memiliki fasilitas air bersih Capaian kinerja untuk indikator persentase desa yang memiliki fasilitas air bersih mencapai seratus persen. Artinya, dari 236 desa yang ada di Wonosobo saat ini semuanya telah memiliki fasilitas air bersih. Capaian tahun 2014 dibandingkan capaian tahun 2013 tidak terdapat perbedaan. Karena sejak tahun 2013 seluruh desa di kabupaten Wonosobo telah memiliki fasilitas air bersih. Perbedaan terletak pada persentase jumlah dusun yang memiliki fasilitas air bersih. Sampai dengan akhir 2014 tinggal 11.8 persen dusun yang belum memiliki fasilitas air bersih.
- ❖ Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas air bersih sampai ke tingkat dusun dengan mendorong inisiatif local dalam pengelolaan air bersih. Melalui penguatan bagi kelompok-kelompok atau lembaga pengelola air yang telah ada di desa diorientasikan untuk mengelola dan memastikan bahwa

masyarakat desa di tingkat RT/RW mendapatkan akses air bersih/air minum. Program yang dikembangkan selama tahun 2014 guna menunjang capaian kinerja yang telah ditetapkan adalah pembinaan bagi Badan Pembina Sarana Penyedia Air Minum/ BPSPAM dengan pendampingan Water Sanitation Program/WSP. Melalui program ini penguatan kapasitas baik tehnik maupun manejerial bagi pengelola air bersih di pedesaan terus ditingkatkan. Agar mampu memastikan akses dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat sampai di tingkat RT/RW. Capaian kinerja atas target ini didukung oleh pelaksanaan beberapa program antara lain: Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Program PNPM mandiri pedesaan, Program Pamsimas, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

- ❖ Selain persoalan fasilitas air bersih yang belum merata pada semua dusun, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga masih dihadapkan pada persoalan munculnya pemukiman baru yang tidak layak baik dari sisi kesehatan maupun pemukiman baru yang berada di daerah rawan bencana mengingat kondisi Kabupaten Wonosobo yang merupakan daerah perbukitan maupun pegunungan. Keterbatasan wilayah pemukiman menjadi salah satu isu penting bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Disatu sisi kebutuhan terus bertambah tetapi disisi lain ketersediaan area pemukiman yang layak sangat terbatas. Pendataan sementara rumah tidak layak huni sebagaimana dirilis oleh Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo menyebutkan sampai dengan tahun 2013 ada sekitar 19.794 rumah tidak layak huni di seluruh Kabupaten Wonosobo.

Prioritas Pengembangan Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Sasaran strategis untuk prioritas ini adalah meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya, meningkatnya kreativitas dan produktivitas pelaku budaya dan meningkatnya penggunaan teknologi produksi tepat guna. Capaian kinerja

prioritas bidang kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi diperoleh dengan pengukuran capaian kinerja masing-masing sasaran strategis.

1) Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya dengan capaian kinerja sebesar 37.5 persen yang diperoleh dari pengukuran atas indikator kinerja berikut:

- Jumlah penelitian yang dilaksanakan dibidang arkeologi, capaian kinerja dari indikator ini adalah 0 persen. Dimana target yang ditetapkan untuk Tahun 2014 adalah dua penelitian yang dilaksanakan dibidang arkeologi. Sampai dengan akhir tahun 2014 belum ada realisasi atas indikator tersebut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo sebagai SKPD yang mempunyai tupoksi tersebut selama satu tahun baru sebatas melakukan inventarisasi terhadap peninggalan budaya yang ada. Sedangkan untuk indikator jumlah karya seni yang berkualitas dari target empat karya seni realisasinya sampai dengan akhir tahun 2014 tercapai 3 karya seni. Sehingga capaian kinerja dari indikator tersebut hanya tercapai 75 persen.
- Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terjadi penurunan pada indikator penelitian yang dilaksanakan dibidang arkeologi. Dimana pada tahun 2013 ada dua penelitian yang dilakukan. Sedangkan untuk karya seni yang berkualitas capaian tahun 2014 sama dengan capaian tahun 2013 yaitu 3 karya seni.
- Penurunan capaian pada indikator penelitian dibidang arkeologi dipengaruhi oleh tidak terlaksananya penelitian karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Anggaran yang tersedia ternyata hanya mencukupi untuk membiayai inventarisasi di bidang arkeologi dengan melibatkan narasumber dari perguruan tinggi. Kondisi tersebut mengakibatkan capaian kinerja pada indikator tersebut tak terpenuhi. Hasil tersebut juga menjadi feedback bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang membidangi tupoksi

tersebut dalam menyusun perencanaan yang lebih baik. Karena untuk melakukan sebuah penelitian arkeologi dengan melibatkan narasumber yang kompeten membutuhkan waktu dan dana yang cukup tinggi.

2) Meningkatnya kreativitas dan produktivitas pelaku budaya.

- ❖ Capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 73.5 persen dari target yang telah ditetapkan. Diperoleh dari hasil pengukuran dua indikator kinerja yang digunakan yaitu jumlah pelaku budaya yang memperoleh penghargaan. Capaian kinerja indikator ini sebesar 80 persen. Dimana pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target lima pelaku budaya yang memperoleh penghargaan dan realisasinya sampai akhir tahun 2014 ada 4 pelaku budaya yang memperoleh penghargaan. Sedangkan untuk indikator jumlah karya budaya yang memperoleh perlindungan HAKI dari target 15 karya realisasinya tercapai 10 karya. Sehingga capaian kinerjanya tercapai 67 persen. Terdapat kesenjangan sebesar 33 persen disbanding target yang telah ditetapkan.
- ❖ Dibandingkan dengan capaian tahun 2013, capaian tahun 2014 realisasinya sama dengan capaian tahun 2013. Dimana pada tahun 2013 jumlah pelaku budaya yang memperoleh penghargaan sebanyak empat orang dan jumlah karya budaya yang memperoleh perlindungan HAKI 10 karya budaya. Capaian tersebut sama dengan realisasi tahun 2014.
- ❖ Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan pelestarian budaya telah melaksanakan beberapa program kegiatan. Tetapi program yang dilaksanakan masih sebatas pada fasilitasi pagelaran atau pentas budaya baik di tingkat lokal, regional maupun tingkat nasional. Kegiatan tersebut selain sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku budaya yang ada di Kabupaten Wonosobo, juga sebagai sarana untuk promosi potensi wisata budaya yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sehingga pelestarian budaya yang selama ini dilakukan

tidak terlepas dari konteks pariwisata. Untuk kedepan selain memperhatikan konteks pariwisata, pelestarian budaya di Kabupaten Wonosobo, perlu lebih diarahkan untuk pelestarian nilai-nilai budaya dan pelestarian karya budaya dengan lebih optimal.

3) Meningkatnya penggunaan teknologi produksi tepat guna.

- Capaian kinerja sasaran strategis ini hanya mencapai 24 persen yang diperoleh dari pengukuran terhadap indikator jumlah industri kecil yang telah memanfaatkan teknologi tepat guna. Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan target 620 industri kecil di Kabupaten Wonosobo telah menggunakan teknologi tepat guna. Realisasinya sampai akhir Tahun 2014 menurut catatan Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Wonosobo industri kecil yang menggunakan teknologi tepat guna sebanyak 150 industri. Dibandingkan dengan capaian tahun 2012 untuk indikator ini mengalami sedikit kenaikan dari 91.66 pada tahun 2012.
- Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 terjadi penurunan yang cukup tajam. Dari 600 industri kecil pada tahun 2013 menjadi 150 pada tahun 2014. Dengan kata lain capaian tahun 2014 hanya 25 persen dari capaian tahun 2013.
- Penurunan capaian pada tahun 2014 tidak terjadi karena menurunnya jumlah industri yang menggunakan teknologi tepat guna dibanding kondisi tahun 2013. Penurunan dibanding tahun sebelumnya dan kesenjangan yang cukup tinggi dengan target tahun 2014 karena perbedaan cara perhitungan/kategori yang digunakan untuk mengukur jenis industri kecilnya dan penggunaan teknologinya. Pada tahun 2013 perhitungan juga dilakukan pada industri mikro dengan kategori teknologi yang lebih sederhana sehingga hasil yang didapatkan juga lebih banyak.

- Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mengembangkan beberapa program kegiatan untuk mendorong pelaku industri kecil dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi tepat guna. Pemanfaatan teknologi tepat guna terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk-produk industri kecil. Upaya mempercepat pemanfaatan teknologi tepat guna sampai saat ini masih difokuskan pada kelompok/sentra industri rumah tangga dengan skala usaha mikro dalam bentuk fasilitasi peralatan hasil teknologi tepat guna pada kelompok. Mengingat untuk wilayah Kabupaten Wonosobo industri yang tumbuh memang masih dalam skala rumahan/mikro. Disamping kemampuan pemerintah kabupaten memang baru mampu untuk kelompok-kelompok industri skala mikro. Bahkan sampai saat ini pun pemanfaatan teknologi terkadang belum efektif ketika produksi masih kecil. Fasilitasi bantuan peralatan kepada kelompok dimaksudkan agar penggunaan teknologi tepat guna ini lebih efektif dan efisien. Selain itu juga sebagai media pembelajaran bagi pelaku industri kecil dalam memahami dan mempelajari aspek-aspek penting penggunaan teknologi bagi kelangsungan usahanya.
- Terkait fasilitasi bantuan peralatan ini, sebagian telah menunjukkan adanya peningkatan produktivitas pelaku industri kecil namun masih ada juga kelompok yang telah difasilitasi alat tetapi pemanfaatannya belum optimal. Sehingga selain fasilitasi alat juga perlu lebih diperhatikan terkait pemanfaatannya dalam meningkatkan produktivitas industri kecil melalui monitoring dan pembinaan secara periodik bagi kelompok dan pelaku industri kecil. Pengembangan dari pemanfaat teknologi tepat guna oleh kelompok industri kecil juga sudah mulai terlihat di tahun 2013 ini. Beberapa kelompok mulai mampu melakukan modifikasi teknologi dalam mendukung produktivitas usahanya. Seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok industri makanan dengan menciptakan alat bantu kerja yang sederhana tetapi cukup membantu produksi yang dilakukan.

- Pada sisi yang lain pemanfaatan teknologi tepat guna ini juga akan berjalan searah dengan perkembangan usaha industri yang dilakukan. Harus diakui beberapa industri kecil yang telah memanfaatkan teknologi tepat guna pun kemudian tidak berkembang ketika perjalanan usahanya tidak mengalami perkembangan.
- Dengan menguatkan sektor industri mikro ini diharapkan kedepan mampu tumbuh industri kecil yang lebih tangguh dan lebih mandiri. Meskipun hal tersebut tentu butuh upaya yang lebih bersungguh-sungguh mengingat kondisi Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk pengembangan pertanian. Selain itu akses pada sumber daya industri juga tidak mudah karena jauh dengan sarana transportasi yang memadai seperti dermaga maupun bandara.

B. REALISASI ANGGARAN

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah . Walaupun Anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang yang mengatur keuangan Negara dan Daerah telah diatur mekanisme dan batas akhir penetapan APBD. Berkaitan dengan hal tersebut, APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tertanggal 31 Desember 2013. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal perubahan APBD, telah ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2014 dengan peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 tentang perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2014. Hal

tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 83 Ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah bahwa persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun berkenaan selambat-lambatnya dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan.

Dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini dikarenakan jumlah penerimaan yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun berkenaan terutama pengeluaran daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berjalan dan belanja-belanja wajib lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hal ini dapat dipahami karena apabila target penerimaan dalam tahun berjalan tidak dapat tercapai akan dapat berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan belanja daerah secara keseluruhan yang pada akhirnya dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih kompleks.

Untuk maksud tersebut, maka dalam penganggaran pendapatan daerah tahun 2014 telah dilakukan secara terukur dan rasional, sehingga sumber-sumber pendapatan yang direncanakan dapat dicapai. Adapun realisasi pendapatan daerah tahun 2014 secara keseluruhan sejumlah Rp 1.277.145.669.695,- atau dapat tercapai 101,42% dari yang direncanakan sejumlah Rp 1.259.212.601.746,-. Realisasi pendapatan daerah tersebut mencakup:

- a) Pendapatan asli Daerah terealisasi sejumlah Rp 175.319.364.867,- atau 138,33% dari yang direncanakan sejumlah Rp 126.737.232.802,-
- b) Dana Perimbangan terealisasi sejumlah Rp 824.656.337.009,- atau 101,50% dari yang direncanakan sejumlah Rp 812.486.954.944,-

- c) Lain-lain Pendapatan yang Sah terrealisasi sejumlah Rp 277.169.968.089,- atau 86,62% dari yang direncanakan sejumlah Rp 319.988.414.000,-

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, serapan APBD tahun 2014 merupakan cermin bagaimana urusan pemerintahan daerah diselenggarakan dan dilaksanakan, dapat dilihat dari realisasi anggaran belanja daerah selama tahun 2014 sebagai berikut :

Realisasi belanja daerah tahun 2014 secara keseluruhan sejumlah Rp 1.220.328.000.161,- atau 80,02% dari yang terencanakan sejumlah 1.525.106.458.420,- yang terdiri dari:

- a. Belanja tidak langsung terrealisasi sejumlah Rp 710.674.835.518,- atau 86,45% dari yang direncanakan sejumlah Rp 822.043.291.951,- yang meliputi belanja-belanja sebagai berikut:
- 1) Belanja pegawai terrealisasi sejumlah Rp 628.028.931.278,- atau 86,19 dari yang direncanakan sejumlah Rp 728.676.919.951,-
 - 2) Belanja hibah , terrealisasi sejumlah Rp 25.416.559.950,- atau 79,17% dari yang direncanakan sejumlah 32.104.250.000,-
 - 3) Belanja bantuan sosial terrealisasi sejumlah Rp 3.340.356.690,- atau 69,56% dari yang direncanakan sejumlah Rp 4.802.122.000,-
 - 4) Belanja bantuan keuangan terrealisasi sejumlah Rp 51.418.016.600,- atau 95,29% dari yang direncanakan sejumlah Rp 53.960.000.000,-

- 5) Belanja tidak terduga terrealisasi sejumlah Rp 2.470.971.000,- atau 98,84% dari yang direncanakan sejumlah Rp 2.500.000.000,-
- b. Belanja langsung terrealisasi sejumlah Rp 509.653.164.643,- atau 72,49% dari yang direncanakan sejumlah Rp 703.063.166.469,- yang mencakup:
 - 1) Belanja pegawai terrealisasi sejumlah Rp 13.752.052.714,- atau 83,87% dari yang direncanakan sejumlah Rp 16.397.374.032,-
 - 2) Belanja barang dan jasa , terrealisasi sejumlah Rp 289.803.040.414,- atau 87,23% dari yang direncanakan sejumlah Rp 332.210.792.587,-
 - 3) Belanja bantuan sosial terrealisasi sejumlah Rp 206.098.071.515,- atau 58,15% dari yang direncanakan sejumlah Rp 354.454.999.850,-

Berdasarkan ketentuan pasal 20 peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dalam menyusun APBD dapat terjadi deficit atau surplus anggaran. Defisit anggaran terjadi apabila jumlah pendapatan daerah lebih kecil dari jumlah anggaran belanja Daerah, dan sebaliknya surplus anggaran terjadi apabila jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah belanja daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup deficit anggaran atau sebaliknya memanfaatkan surplus anggaran daerah.

Realisasi pembiayaan daerah dalam tahun 2014 terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 297.208.756.864,- atau 100,02% dari yang direncanakan sejumlah Rp 297.157.825.674,- meliputi sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun 2013 sejumlah Rp 297.208.756.864,- dan penerimaan piutang sejumlah Rp 50.931.190,-
- b. Pengeluaran pembiayaan terrealisasi sejumlah Rp 26.263.969.000,- atau 84,01% dari yang direncanakan sejumlah Rp 31.263.969.000,- Pengeluaran digunakan untuk pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 7.000.000.000,- dan penyertaan modal daerah sejumlah Rp 19.263.969.000,-.

BAB IV

PENUTUP

*L*aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonosobo

merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja dari indikator kinerja masing-masing sasaran strategis dari prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo menunjukkan capaian kinerja Tahun 2014 mencapai 93.45 persen. Hasil tersebut diperoleh dari pengukuran atas capaian kinerja pada sebelas bidang prioritas dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2014.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2013, mengalami kenaikan capaian sebesar 2.65 persen dimana pada tahun 2013 capaian kinerjanya sebesar 90.80 persen menjadi 93.45 persen pada tahun 2014. Capaian kinerja yang mengalami peningkatan meliputi: capaian kinerja bidang pendidikan, infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan, konsolidasi dan reformasi birokrasi, iklim dan investasi usaha serta energy dan sumber daya mineral.

Disamping tujuh bidang yang mengalami kenaikan capaian dibanding tahun 2013, terjadi penurunan capaian pada empat bidang yang lain yaitu: penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan keluarga berencana, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta bidang kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Perbandingan capaian kinerja dalam tiga terakhir diperlihatkan dalam table berikut:

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA (%)		
		2014	2013	2012
1.	Penanggulangan Kemiskinan	78.25	81.80	97
2.	Pendidikan	90.65	87.85	94.15
3.	Kesehatan dan Keluarga Berencana	87.80	96	92.6
4.	Infrastruktur	92.30	68.80	54.04
5.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	95.00	85.31	101.73
6.	Konsolidasi dan Reformasi Birokrasi	131.17	101.42	103

7.	Iklim dan Investasi Usaha	125.50	100	107.15
8.	Energi dan Sumber Daya Mineral	66.50	59.50	59.25
9.	Lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana	94.00	113	120.66
10.	Kawasan Tertinggal, Terbelakang, Perbatasan dan Kumuh	121.80	113.50	106.5
11.	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi	45.00	91.70	72.4
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA		93.45	90.80	91.68

Terkait dengan hasil pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 tersebut dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Bidang Penanggulangan Kemiskinan:

Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan realisasi kinerja baru tercapai 78.25 persen mengalami penurunan disbanding capaian tahun 2013 sebesar 3.35 persen. Penurunan capaian dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Untuk persentase penduduk miskin mengalami penurunan meskipun prosentasenya tidak signifikan.

Bidang Pendidikan:

Realisasi kinerja bidang pendidikan untuk tahun 2014 sebesar 90.65 persen dari target yang telah ditetapkan. Hampir semua indikator menunjukkan peningkatan dibanding realisasi tahun 2013. Dengan capaian tersebut terjadi peningkatan kinerja sebesar 2.8 persen dibanding realisasi tahun 2013.

Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Realisasi kinerja bidang kesehatan dan keluarga berencana tahun 2014 sebesar 87.80 persen. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 8.2 persen. Dimana realisasi kinerja tahun 2013 sebesar 96 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh capaian pada bidang keluarga berencana dimana persentase drop out KB realisasi atas target cukup rendah.

Bidang Infrastruktur

Untuk realisasi kinerja bidang infrastruktur pada tahun 2014 sebesar 92.30 persen. Mengalami peningkatan sebesar 23.5 persen dibanding realisasi tahun 2013. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan capaian kinerja pada semua indikator kinerja yang diukur.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

Realisasi kinerja pertanian dan ketahanan pangan tahun 2014 sebesar 95.00 persen. Mengalami peningkatan 9.69 persen dari realisasi kinerja tahun 2013. Peningkatan dipengaruhi oleh peningkatan pada tiga sasaran strategis yang semuanya mengalami kenaikan. Peningkatan paling menonjol pada capaian peningkatan layanan irigasi teknis.

Bidang Konsolidasi dan Reformasi Birokrasi

Realisasi kinerja konsolidasi dan reformasi birokrasi tahun 2014 mencapai 131.17 persen. Mengalami peningkatan 29.75 persen dibanding realisasi kinerja tahun 2013. Peningkatan dipengaruhi oleh capaian pendapatan asli daerah yang mengsebesar 253 persen dibanding target tahun 2014.

Bidang Iklim dan Investasi Usaha

Realisasi kinerja untuk iklim dan investasi usaha mencapai 125.50 persen dimana pada indikator jumlah investasi terget kinerja tercapai 100 persen. Sedangkan nilai investasi capaiannya diatas target yang telah ditetapkan untuk tahun 2014.

Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Realisasi kinerja ini diperoleh dari capaian peningkatan penggunaan energi alternatif dan pemenuhan kebutuhan energi listrik. Realisasi kinerja tahun 2014 mencapai 66.50 persen meningkat tujuh persen dibanding realisasi kinerja tahun 2013. Peningkatan dipengaruhi oleh kenaikan pada rumah tangga yang telah menggunakan listrik sehingga target kinerja dapat tercapai 100 persen.

Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Realisasi kinerja bidang lingkungan hidup dan penggulangan bencana tahun 2014 94 persen mengalami penurunan sebesar 19 persen dibanding capaian tahun 2013. Penurunan terjadi karena meningkatnya persentase jumlah korban meninggal sepanjang tahun 2014.

Bidang Kawasan Tertinggal, Terbelakang, Perbatasan dan Kumuh

Realisasi kinerja prioritas ini mencapai 121.80 persen pada tahun 2014. Mengalami kenaikan 8.7 persen dibanding realisasi tahun 2013. Capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki sepanjang tahun 2014 serta area pemukiman kumuh mampu ditangani.

Bidang Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Realisasi kinerja prioritas ini sebesar 45.00 persen pada tahun 2014. Mengalami penurunan sebesar 46.7 persen dibanding realisasi tahun 2013. Penurunan capaian dipengaruhi oleh tidak tercapainya target penelitian dalam bidang arkeologi dan reaktivasi byang sangat rendah pada indicator jumlah industri kecil yang memanfaatkan teknologi tepat guna.

Rekomendasi:

1. Dari hasil pengukuran kinerja Tahun 2014, dengan capain kinerja rata-rata 93.45 persen, prioritas pembangunan yang capaian kinerjanya masih dibawah capaian rata-rata perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar kinerja kedepan dapat ditingkatkan.
2. Perlu terus ditingkatkan keselarasan antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga program kegiatan yang dilaksanakan memang benar-benar mempunyai daya dukung bagi pencapaian target kinerja.
3. Beberapa perbaikan yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja masing bidang prioritas antara lain:

Bidang penanggulangan kemiskinan:

- Peningkatan keterpaduan antar sektor dalam penanggulangan kemiskinan.
- Menyusun grand design penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.
- Meningkatkan kualitas pencari kerja yang masih rendah baik pendidikan maupun ketrampilannya.

Bidang pendidikan:

- Meningkatkan akses pada pendidikan yang murah dan berkualitas bagi masyarakat terutama di pedesaan.
- Meningkatkan SDM pendidik melalui pengembangan kualitas mutu pendidik.

Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana:

- Meningkatkan akses pada kesehatan yang murah dan berkualitas bagi masyarakat.
- Meningkatkan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.
- Peningkatan kualitas makanan dan minuman yang sehat bagi masyarakat.
- Meningkatkan layanan kualitas dan jangkauan KB bagi pasangan usia subur.
- Meningkatkan SDM penyuluh KB baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Bidang Infrastruktur:

- Meningkatkan kualitas pembangunan pembangunan infrastruktur agar usia pakainya lebih panjang.
- Meningkatkan SDM pengawasa baik kuantitas maupun kualitasnya.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

Bidang pertanian dan ketahanan pangan:

- Meningkatkan peran PPL dalam intensifikasi pertanian.
- Meningkatkan produksi benih unggul di sektor perikanan.
- Meningkatkan peran dinas teknis dalam melakukan pendampingan bagi pelaku usaha sektor peternakan .

Bidang Konsolidasi Reformasi Birokrasi

- Meningkatkan tata kelola asset milik daerah agar lebih baik dan akuntabel.
- Mengoptimalkan fungsi perencanaan baik di tingkat SKPD maupun di tingkat kabupaten untuk meningkatkan kualitas program/kegiatan dalam pencapaian target kinerja.
- Revitalisasi fungsi perencanaan dalam struktur kelembagaan daerah.

- Meningkatkan komitmen dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih kongkrit.

Bidang iklim investasi dan usaha:

- Melakukan perbaikan regulasi dan penyederhanaan proses perijinan.
- Menyusun desain penanaman modal dan perijinan dalam satu pintu.
- Meningkatkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan investasi di Wonosobo.
- Meningkatkan koordinasi antar SKPD juga perlu diperkuat terkait peningkatan potensi dan daya saing daerah agar SKPD mempunyai peran dan kontribusi yang lebih jelas bagi arah pengembangan investasi di Wonosobo. Identifikasi potensi investasi dari masing-masing SKPD sesuai dengan bidang tugasnya perlu disinergikan sehingga Wonosobo memiliki data potensi investasi yang lebih komprehensif.

Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral:

- Melakukan fasilitasi dan pendampingan untuk pemanfaatan energi alternatif.

Bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana:

- Meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan yang masih rendah pada sebagian masyarakat.
- Membentuk lembaga yang secara spesifik menangani bencana.

Bidang kawasan tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh

- Meningkatkan akses dan infrastruktur bagi daerah perbatasan.
- Melakukan penataan pemukiman pada wilayah yang tidak layak huni.

Bidang kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi:

- Menyusun pola pengembangan kebudayaan daerah.
- Meningkatkan SDM dalam bidang kebudayaan.
- Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan bagi pengembangan kreativitas bagi masyarakat.